



**LAPORAN KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH
KABUPATEN LAHAT
TAHUN 2023**



**PEMERINTAH KABUPATEN LAHAT
TAHUN 2024**



BUPATI LAHAT

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan atas kehadiran Allah SWT, karena berkat rahmat dan karunia-Nya, penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kabupaten Lahat Tahun 2022 ini dapat diselesaikan. Laporan ini disusun berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.


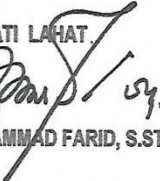
Laporan ini merupakan upaya Pemerintah Kabupaten Lahat untuk menginformasikan pertanggungjawaban kinerja yang telah dilakukan pada tahun 2023 dan sebagai bentuk konsistensi Pemerintah Kabupaten Lahat terhadap komitmen menciptakan transparansi yang merupakan pilar terwujudnya tata pemerintahan yang baik.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Lahat Tahun 2023 ini diharapkan dapat memberikan gambaran tentang penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan kebijakan program dan kegiatan, serta pencapaian sasaran dalam mewujudkan tujuan, Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Lahat sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lahat Tahun 2019-2023.

Hasil pencapaian kinerja Pemerintah Kabupaten Lahat tidak terlepas dari kerjasama semua pihak, yaitu masyarakat, pihak swasta dan semua lembaga pemerintah baik yang terlibat dalam perumusan kebijakan maupun dalam implementasi serta pengawasannya.

Akhir kata kami mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, dan berpartisipasi dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kabupaten Lahat Tahun 2023 ini.

Lahat, 01 Maret 2024

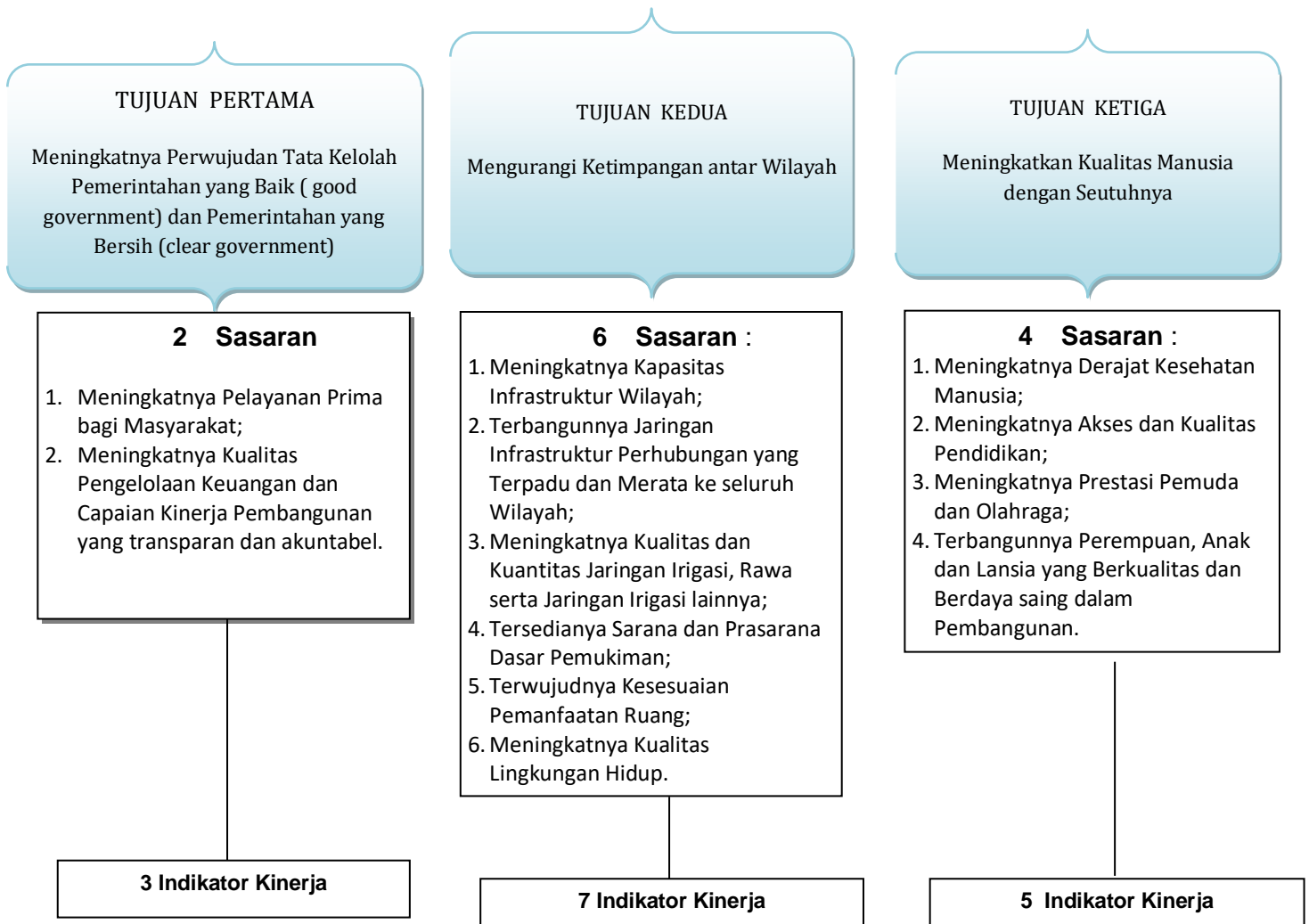

BUPATI LAHAT

MUHAMMAD FARID, S.STP., M.Si

IKHTISAR EKSEKUTIF

Pemerintah Kabupaten Lahat telah berupaya menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi dengan berprinsip pada tata kelola pemerintahan yang baik dan berorientasi pada hasil sesuai dengan kewenangannya. Dalam mewujudkan *good governance*, akuntabilitas merupakan salah satu aspek penting yang harus diimplementasikan dalam manajemen pemerintahan. Akuntabilitas kinerja harus memuat visi, misi, tujuan dan sasaran yang memiliki arah dan tolok ukur yang jelas atas perumusan dan perencanaan strategis organisasi sehingga menggambarkan hasil yang ingin dicapai dalam bentuk sasaran dapat diukur, diuji dan diandalkan.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kabupaten Lahat tahun 2023 ini merupakan implementasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lahat, yang memuat informasi tentang keberhasilan dan juga kegagalan pencapaian sasaran yang telah ditetapkan, termasuk hambatan-hambatan yang terjadi dan bagaimana pemecahannya. LKjIP tidak hanya sekedar alat akuntabilitas, tetapi juga sebagai sarana yang strategis untuk mengevaluasi diri dalam rangka peningkatan kinerja ke depan.

Berdasarkan Perjanjian Kinerja Kabupaten Lahat Tahun 2023 telah terhadap 24 (dua puluh empat) indikator kinerja yang bersumber dari 5 (lima) tujuan dan 19 (sembilan belas) sasaran strategis, dengan rincian sebagai berikut:



TUJUAN KEEMPAT

- Meningkatnya Pendapatan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial
- Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi

3 Sasaran

1. Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi;
2. Meningkatnya Kesejahteraan Sosial;
3. Meningkatnya Kesempatan Kerja.

6 Indikator Kinerja

TUJUAN KELIMA

Terwujudnya Masyarakat yang Berakhlak Mulia

2 Sasaran

1. Meningkatnya Nilai Keagamaan masyarakat;
2. Terwujudnya Budaya sebagai Identitas Spesifik Daerah.

3 Indikator Kinerja

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
IKHTISAR EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GRAFIK	ix
BAB I.	PENDAHULUAN.....	1
	A. Latar Belakang.....	1
	B. Organisasi Pemerintah Kabupaten Lahat.....	3
	C. Permasalahan Pembangunan Daerah.....	11
	D. Isu Strategis Daerah.....	15
	E. Sistematika Penyajian.....	28
BAB II.	PERENCANAAN KINERJA.....	30
	A. Rencana Strategis.....	30
	1. Visi dan Misi.....	30
	2. Tujuan dan sasaran.....	32
	B. Indikator Kinerja Utama.....	34
	C. Perjanjian Kinerja.....	40
BAB III	AKUNTABILITAS KINERJA.....	45
	A. Capaian Kinerja Pemerintah Kabupaten Lahat.....	46
	1. Tujuan Pertama.....	49
	1.1. Capaian Kinerja Tujuan Pertama“ Meningkatnya Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (Good Government) dan Pemerintahan yang Bersih (Clean Government)”	49
	a.1.1. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023.....	54
	a.1.2. Perbandingan antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun Sebelumnya.....	58
	a.1.3. Perbandingan antara Realisasi Kinerja Tahun 2023Target Akhir RPJMD.....	54
	a.1.4. Analisis Penyebab Keberhasilan /Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang telah dilakukan.....	55

2. Tujuan Kedua.....	
2.1. Capaian Kinerja Tujuan Kedua “ Mengurangi ketimpangan Antar Wilayah”.....	62
a.2.1. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023	62
a.2.2. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun Sebelumnya.....	63
a.2.3. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Target Akhir RPJMD.....	64
a.2.4. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif solusi yang telah dilakukan	65
	66
3. Tujuan Ketiga.....	
3.1. Capaian Kinerja Tujuan Ketiga “Meningkatkan Kualitas Manusia dengan Seutuhnya“.....	69
a.3.1. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Tahun 2023.....	69
a.3.2. Perbandingan Antara Realisasi Tahun 2023 dengan Tahun Sebelumnya ...	70
a.3.3. Perbandingan Antara Realisasi Tahun 2023 dengan Target Akhir RPJMD.....	71
	71
4. Tujuan Keempat.....	
4.1 Capaian Kinerja Tujuan Keempat “Meningkatkan Pendapatan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial”.....	73
a.4.1. Pebandingan Antara Target dan Realisasi Tahun 2023.....	73
a.4.2 Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan tahun Sebelumnya.....	74
a.4.3 Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Target Akhir RPJMD.....	74
	76
5. Tujuan Kelima.....	
5.1. Capaian Kinerja Tujuan Kelima “Terwujudnya Masyarakat yang Berakhlak Mulia”.....	77
a.5.1. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Tahun 2023.....	77
a.5.2. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun Sebelumnya.....	77
a.5.3. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Target Akhir RPJMD.....	78
	79

	B. Realisasi Anggaran.....	
BAB IV	PENUTUP.....	96
	A. Kesimpulan.....	96
	B. Rekomendasi.....	99
	LAMPIRAN – LAMPIRAN	101
	A. PERJANJIAN KINERJA BUPATI LAHAT TAHUN 2023	
	B. INDIKATOR KINERJA UTAMA	

DAFTAR TABEL

Tabel I.1	: Tabel Resume Permasalahan Per Urusan Sampai Dengan Tahun 2020	11
Tabel I.2	: Tingkat Pengangguran Terbuka Penduduk Usia 15 Tahun Ke Atas Menurut Jenis Kelamin Tahun 2015-2020	22
Tabel I.3	: Persentase Penduduk Yang Bekerja Kurang Dari 35 Jam Seminggu Tahun 2017-2020	23
Tabel I.4	: Rasio Panjang Jalan Terhadap Jumlah Penduduk Kabupaten Lahat (Ribu Jiwa/Km)	25
Tabel I.5	: Rasio Panjang Jalan Terhadap Luas Wilayah Di Kabupaten Lahat	25
Tabel II.1	: Indikator Kinerja Utama Kabupaten Lahat Tahun 2023	35
Tabel II.2	: Perjanjian Kinerja Kabupaten Lahat Tahun 2023	42
Tabel III.1	: Skala Nilai Peringkat Kinerja	46
Tabel III.2	: Target, Realisasi Dan Capaian Kinerja Tahun 2023	47
Tabel III.2.1.1	: Perbandingan Antara Target Dan Realisasi Kinerja Tahun 2023 Untuk Tujuan Meningkatkan Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Dan Pemerintahan Yang Bersih	50
Tabel III.2.1.2	: Hasil Survei Kepuasan Masyarakat Atas Pelayanan Publik Pada 3 (Tiga) OPD Penyelenggara Pelayanan Publik Secara Langsung Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lahat Tahun 2023	52
Tabel III.2.1.3	: Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Tahun 2023 Dengan Tahun Sebelumnya Untuk Tujuan Meningkatkan Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Dan Pemerintahan Yang Bersih	54
Tabel III.2.1.4	: Realisasi Kinerja Dibanding Target Jangka Menengah Untuk Tujuan Meningkatkan Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Dan Pemerintahan Yang Bersih	55
Tabel III.2.2.1	: Perbandingan Antara Target Dan Realisasi Kinerja Tahun 2023 Untuk Tujuan Mengurangi Ketimpangan Antar Wilayah	63
Tabel III.2.2.2	: Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun Sebelumnya Untuk Tujuan Mengurangi Ketimpangan Antar Wilayah	65
Tabel III.2.2.3	: Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Target Akhir RPJMD Untuk Tujuan Mengurangi Ketimpangan Antar Wilayah	66
Tabel III.2.3.1	: Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023 Untuk Tujuan Meningkatkan Kualitas Manusia Dengan Seutuhnya	70
Tabel III.2.3.2	: Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Tahun 2023 Dengan Tahun Sebelumnya Untuk Tujuan Meningkatkan Kualitas Manusia Dengan Seutuhnya	71
Tabel III.2.3.3	: Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Tahun 2023 Dengan Target Akhir RPJMD Untuk Tujuan Meningkatkan Kualitas Manusia Dengan Seutuhnya	72
Tabel III.2.4.1	: Perbandingan Antara Target Dan Realisasi Tahun 2023 Untuk Tujuan Meningkatkan	74

	Pendapatan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial	
Tabel III.2.4.2	: Perbandingan Antara Realisasi Tahun 2023 dengan Tahun Sebelumnya Untuk Tujuan Meningkatnya Pendapatan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial	75
Tabel III.2.4.3	: Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Tahun 2023 Dengan Target Akhir RPJMD Untuk Tujuan Meningkatnya Pendapatan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial	76
Tabel III.2.5.1	: Perbandingan Antara Target Dan Realisasi Tahun 2023 Untuk Tujuan Terwujudnya Masyarakat Yang Berakhlak Mulia	77
Tabel III.2.5.2	: Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Tahun 2023 Dengan Tahun Sebelumnya Untuk Tujuan Terwujudnya Masyarakat Yang Berakhlak Mulia	78
Tabel III.2.5.3	: Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Tahun 2023 Dengan RPJMD Untuk Tujuan Terwujudnya Masyarakat Yang Berakhlak Mulia	79

DAFTAR GRAFIK

Grafik I.1	: Pengelompokan Wilayah Berdasarkan Persentase Penduduk Miskin Eskترم (%) Dan Jumlah Penduduk Miskin Ekstrem (Jiwa) Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2020	16
Grafik I.2	: Distribusi Kabupaten/Kota Di Sumatera Selatan Berdasarkan Persentase Penduduk Miskin Ekstrem Dan Belanja Kesejahteraan	17
Grafik I.3	: Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Lahat Terhadap Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016-2020	18
Grafik I.4	: Distribusi Persentase Pmdn Kabupaten Lahat Tahun 2020	19
Grafik I.5	: Distribusi Persentase Pma Kabupaten Lahat Tahun 2020	20
Grafik I.6	: Persentase Rumah Tangga Yang Pernah Mendapatkan Kredit Usaha Tani Setahun Terakhir	21
Grafik I.7	: Realisasi Hasil Produksi Tanaman Pangan Kabupaten Lahat Tahun 2016-2020	21
Grafik I.8	: Persentase Kondisi Irigasi Kabupaten Lahat Tahun 2020	22
Grafik I.9	: Persentase Jalan Menurut Jenis Permukaan Jalan Kabupaten Lahat Tahun 2020	26
Grafik I.10	: Persentase Panjang Jalan Menurut Kondisi Jalan Kabupaten Lahat Tahun 2020	26
Grafik I.11	: Persentase Rumah Tangga Dengan Sanitasi Dan Akses Air Minum Yang Layak Tahun 2016-2020	27
Grafik I.12	: Luasan Kumuh (Ha) Kabupaten Lahat Tahun 2021	27
Grafik I.13	: Rumah Tidak Layak Huni Kabupaten Lahat Tahun 2021	28

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) menjadi misi utama bagi pemerintahan yang demokratis, karena esensi otonomi daerah adalah meningkatkan : *public service function*(fungsi pelayanan masyarakat), *development function* (fungsi pembangunan) dan *protection function*.

Berdasarkan penjelasan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pemberian otonomi yang seluas-luasnya kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Di samping itu melalui otonomi luas, dalam lingkungan strategis globalisasi, daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman daerah dalam system Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Paradigma pemerintahan yang baik mempunyai arti bahwa penyelenggaraan pemerintahan harus dapat diukur dan dinilai kinerjanya dengan menggunakan “indikator-indikator pemerintahan yang baik”, yaitu :

1. Demokrasi, desentralisasi dan peningkatan kemampuan pemerintah;
2. Hormat terhadap Hak Azazi Manusia dan kepatuhan terhadap hukum;
3. Partisipasi Rakyat;
4. Efisiensi, akuntabilitas, transparansi dalam pemerintahan dan administrasi pemerintahan;
5. Perhatian terhadap pemerataan dan kemiskinan;

6. Komitmen terhadap kebijakan ekonomi yang berorientasi pasar.

Salah satu pilar *good governance* adalah akuntabilitas sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang menjelaskan bahwa akuntabilitas merupakan perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan melalui program dan kegiatan yang telah direncanakan secara periodik. Ini berarti bahwa akuntabilitas berkaitan dengan pelaksanaan *review* dan evaluasi mengenai standar pelaksanaan kegiatan, apabila standar tersebut dirasa sudah tepat dengan situasi dan kondisi yang dihadapi, manajemen memiliki tanggung jawab untuk mengimplementasikan standar-standar tersebut. Akuntabilitas juga merupakan instrument untuk kegiatan kontrol terutama dalam pencapaian hasil pada pelayanan publik. Dalam hubungan ini, diperlukan *review* dan evaluasi kinerja untuk mengetahui sejauh mana pencapaian hasil serta cara-cara yang digunakan untuk mencapai semua itu.

Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Lahat adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten Lahat dalam pelaksanaan setiap program dan kegiatan yang telah ditetapkan. Dalam perspektif yang lain, laporan kinerja merupakan alat kendali, penilai kinerja secara kuantitatif dan sebagai wujud transparansi pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah dalam mewujudkan *good governance* atau sebagai media pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten Lahat terhadap masyarakat Kabupaten Lahat.

Untuk mencapai peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat, Pemerintah Kabupaten Lahat membagi tugas-tugas pemerintahan, kemasyarakatan dan pelayanan kepada seluruh perangkat daerah. Pelaksanaan tugas organisasi yang dibentuk

tersebut diarahkan untuk peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat, oleh karena itu masing-masing organisasi wajib mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dalam bentuk laporan kinerja. Selanjutnya berdasarkan laporan kinerja tersebut disusun laporan kinerja pemerintah kabupaten, hal ini sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.

Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Lahat berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan secara teknis penyusunannya berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Daerah Kabupaten Lahat Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lahat Tahun 2019 – 2023.

B. ORGANISASI PEMERINTAH KABUPATEN LAHAT

Struktur Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lahat sebagai wadah penyelenggara pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan ditetapkan dengan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah yang ditindak lanjuti penerapannya di Kabupaten Lahat dengan Peraturan Daerah sebagai berikut :

1. Peraturan Daerah Kabupaten Lahat Nomor 04 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lahat;

2. Peraturan Daerah Kabupaten Lahat Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pembentukan Kecamatan Mulak Sebingkai;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Lahat Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pembentukan Kecamatan Lahat Selatan;
4. Peraturan Bupati Lahat Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lahat;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Lahat Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Lahat Nomor 04 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lahat;
6. Peraturan Bupati Lahat Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan keempat atas Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lahat;
7. Peraturan Bupati Lahat Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Di Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Lahat.

Susunan Organisasi Pemerintah Kabupaten Lahat berdasarkan regulasi-regulasi tersebut terdiri dari :

a. Sekretariat Daerah, terdiri dari :

- Sekretaris Daerah;
- Asisten I (Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat) meliputi :
 1. Bagian Pemerintahan;
 2. Bagian Kesejahteraan Rakyat;
 3. Bagian Hukum.
- Asisten II (Bidang Perekonomian dan Pembangunan) meliputi :
 1. Bagian Perekonomian;

2. Bagian Administrasi Pembangunan;
 3. Bagian Pengadaan Barang dan Jasa;
 4. Bagian Administrasi Sumber Daya Alam.
- Asisten III (Bidang Administrasi Umum) meliputi :
 1. Bagian Umum;
 2. Bagian Organisasi;
 3. Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan;
 4. Bagian Perencanaan dan Keuangan;
 5. Bagian Perlengkapan.
- b. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, terdiri dari Sekretaris Dewan, Bagian Umum, Bagian Rapat, Risalah, Hukum dan Program dan Bagian Keuangan.
 - c. Inspektorat, terdiri dari Inspektur, Sekretaris dan 5 orang Inspektur Pembantu.
 - d. Dinas-Dinas dalam Kabupaten Lahat, terdiri dari :
 1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tipe A;
 2. Dinas Kesehatan Tipe A;
 3. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tipe B;
 4. Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Tipe B;
 5. Satuan Polisi Pamong Praja Tipe B;
 6. Dinas Sosial Tipe A;
 7. Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Tipe B;
 8. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tipe B;
 9. Dinas Ketahanan Pangan Tipe B;
 10. Dinas Lingkungan Hidup Tipe A;
-
-

11. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tipe A;
12. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tipe A;
13. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tipe A;
14. Dinas Perhubungan Tipe A;
15. Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Tipe A;
16. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Tipe A;
17. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tipe A;
18. Dinas Kepemudaan dan Olahraga Tipe A;
19. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tipe A;
20. Dinas Perikanan Tipe B;
21. Dinas Pariwisata Tipe B;
22. Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Tipe A;
23. Dinas Perkebunan Tipe A;
24. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tipe A.
25. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Tipe B.

e. Lembaga Teknis Daerah, terdiri dari :

1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tipe A;
2. Badan Pendapatan Daerah Tipe A;
3. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Tipe A;
4. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
5. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tipe B;
6. Badan Penelitian dan Pengembangan Tipe B;
7. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;

f. Pemerintahan Kecamatan, terdiri dari Camat, Sekretaris Camat yang membawahkan Subbagian Umum dan Kepegawaian, Subbagian Perencanaan dan Keuangan, dan seksi-seksi yaitu Seksi Pemerintahan, Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa/kelurahan, Seksi Ketentraman dan Ketertiban, Seksi Kesejahteraan Sosial, Seksi Pelayanan Umum. Kecamatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lahat terdiri dari 24 Kecamatan yaitu sebagai berikut :

1. Kecamatan Lahat;
2. Kecamatan Merapi Barat;
3. Kecamatan Merapi Timur;
4. Kecamatan Merapi Selatan;
5. Kecamatan Pulau Pinang;
6. Kecamatan Pagar Gunung;
7. Kecamatan Gumay Ulu;
8. Kecamatan Tanjung Tebat;
9. Kecamatan Kota Agung;
10. Kecamatan Mulak Ulu;
11. Kecamatan Jarai;
12. Kecamatan Pajar Bulan;
13. Kecamatan Muara Payang;
14. Kecamatan Suka Merindu;
15. Kecamatan Tanjung Sakti PUMU;
16. Kecamatan Tanjung Sakti PUMI;
17. Kecamatan Gumay Talang;
18. Kecamatan Kikim Barat;

19. Kecamatan Kikim Timur;
 20. Kecamatan Kikim Tengah;
 21. Kecamatan Kikim Selatan;
 22. Kecamatan PSEKSU;
 23. Kecamatan Mulak Sebingkai;
 24. Kecamatan Lahat Selatan;
- g. Pemerintahan Kelurahan, terdiri dari Lurah, Sekretaris Lurah, Seksi Pemerintahan, Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum, Seksi Perekonomian dan Pembangunan, Seksi Keuangan dan Umum. Untuk kelurahan sendiri terdiri dari 17 Kelurahan. Disamping kelurahan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lahat juga terdapat Pemerintahan Desa yang berjumlah 360 Desa.

Perangkat Daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lahat Nomor 04 Tahun 2016 tersebut memiliki tugas pokok serta fungsi yaitu :

a. Sekretariat Daerah :

Sekretariat Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyusunan kebijakan dan pengkoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas perangkat daerah serta pelayanan administratif. Dalam menyelenggarakan tugas tersebut Sekretariat Daerah mempunyai fungsi :

1. Pengkoordinasian, penyusunan kebijakan daerah;
2. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas satuan kerja perangkat daerah;
3. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah;
4. Pelayanan administratif dan pembinaan aparatur sipil negara pada instansi daerah, dan:

5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

b. Dinas Daerah :

Dinas Daerah mempunyai fungsi masing-masing sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lahat Nomor 04 Tahun 2016 sebagai berikut :

1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan dan kebudayaan;
2. Dinas Kesehatan menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan;
3. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
4. Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perumahan rakyat dan kawasan pemukiman serta bidang pertanahan;
5. Satuan Polisi Pamong Praja menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan ketentraman dan ketertiban umum;
6. Dinas Sosial menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemerintahan dan sosial;
7. Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja dan bidang transmigrasi;
8. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan bidang perlindungan anak;

9. Dinas Ketahanan Pangan menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pangan;
10. Dinas Lingkungan Hidup menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup;
11. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan catatan sipil;
12. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
13. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
14. Dinas Perhubungan menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan;
15. Dinas Komunikasi, Informatika, statistik dan Persandian menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik dan persandian;
16. Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah;
17. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal;
18. Dinas Pemuda dan Olahraga menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan olahraga;
19. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perpustakaan dan bidang kearsipan;
20. Dinas Perikanan menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perikanan;

21. Dinas Pariwisata menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pariwisata;
 22. Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian sub urusan tanaman pangan, hortikultura serta sub urusan peternakan;
 23. Dinas Perkebunan menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang pertanian sub urusan perkebunan;
 24. Dinas Perindustrian dan Perdagangan menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian dan bidang perdagangan;
 25. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan menyelenggarakan sub urusan pemerintah dibidang urusan kebakaran.
- c. Inspektorat merupakan unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah, yang dipimpin oleh seorang Inspektur yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada bupati melalui sekretaris daerah. Inspektur mempunyai tugas membantu bupati membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh perangkat daerah. Inspektur dalam menjalankan tugasnya menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :
1. Perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
 2. Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya;
 3. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan bupati;
 4. Penyusunan laporan hasil pengawasan;
 5. Pelaksanaan administrasi inspektorat, dan:
 6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

d. Kecamatan dipimpin oleh seorang camat yang mempunyai sebagai berikut :

1. Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum;
2. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
3. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
4. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati;
5. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
6. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah tingkat kecamatan;
7. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa dan/atau kelurahan;
8. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintah kabupaten yang ada di kecamatan, dan:
9. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

C. PERMASALAHAN PEMBANGUNAN DAERAH

Permasalahan pembangunan daerah adalah perbedaan atau kesenjangan pencapaian antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang telah direncanakan, serta antara apa yang ingin dicapai di masa mendatang dengan kondisi saat ini. Evaluasi terhadap rencana pembangunan daerah bertujuan untuk mewujudkan kesesuaian antara capaian pembangunan daerah dengan indikator kinerja yang telah ditetapkan. Indikator Kinerja Daerah (IKD) Kabupaten Lahat tahun 2019 – 2023 meliputi indikator makro daerah dan indikator kinerja program daerah. Berdasarkan data dari dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lahat Tahun

2019 – 2023, capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan Kabupaten Lahat dapat di lihat pada tabel I.1. berikut ini :

TABEL I.1
Tabel resume permasalahan per urusan sampai dengan tahun 2020

NO	URUSAN	PERMASALAHAN
I	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	
1	Pendidikan	<p>a. Angka Partisipasi Sekolah di Kabupaten Lahat Tahun 2020 adalah sebesar 70,35. Angka ini menurun dari Tahun sebelumnya di 2019 yaitu sebesar</p> <p>b. Angka Harapan Lama Sekolah sampai pada tahun 2020 belum mencapai target RPJMD. Capaian Kabupaten Tahun 2020 masih di bawah capaian Provinsi yaitu 12,45 dan Nasional 12,98 tahun</p>

NO	URUSAN	PERMASALAHAN
		<p>c. Menurunnya Angka Partisipasi Kasar SD/MI yaitu APS SD/MI Tahun 2020 sebesar 109,94 dari Tahun 2019 sebesar</p> <p>d. Menurunnya Angka Partisipasi Murni SMA/SMK/MA APM SMA/SMK/MA Tahun 2020 sebesar 67.06 menurun sebesar</p> <p>e. Ratio Murid/sekolah SD/MI Menurun Ratio Murid/Sekolah SD/MI Tahun 2020 sebesar 141,82</p> <p>f. Ratio Murid/ Guru SLTP/MTs dan SMU/SMK/MA menurun Ratio Murid/Guru SLTP/MTs sebesar 11,27 dan SMU/SMK/MA Tahun 2020 sebesar 11,47</p> <p>g. Angka Melek Huruf Menurun Angka Melek Huruf Tahun 2020 sebesar 98,9</p> <p>h. Melambatnya laju kenaikan Rata-rata Lama Sekolah RLS Tahun 2020 sebesar 9</p> <p>i. Melambatnya laju kenaikan Angka Harapan Lama Sekolah AHLS Tahun 2020 sebesar 12,43</p> <p>j. Angka Putus Sekolah (tidak punya ijazah SD) tinggi Angka Putus Sekolah Tahun 2020 17,59%</p>
2	Kesehatan	<p>a. Masih ada Kelahiran yang ditolong oleh Tenaga Non Kesehatan. Kelahiran di tolong Dukun bersalin Tahun 2020 sebesar 0,64%</p> <p>b. Angka Morbiditas Meningkat. Angka Morbiditas Tahun 2020 sebesar 33,85</p>

		c.	Persentase Gizi Buruk meningkat Persentase Gizi Buruk Tahun 2020 0,71%
		d.	Persentase Berat Bayi Lahir Rendah (BBLR) Meningkat drastic. Perentase BBRL Tahun 2020 11,06%
		e.	Incidence Rate Demam Berdarah Meningkat. Incidence Rate Demam Berdarah Tahun 2020 37/100.000 penduduk.
3.	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	a.	Kondisi jalan rusak meningkat. Persentase Jalan Rusak Tahun 2020 sebesar 44%
		b.	Kondisi irigasi rusak tinggi. Persentase irigasi rusak ringan 79,78 %, rusak sedang 1,64, rusak berat 4,92% di tahun 2020
4.	Permukiman dan kawasan permukiman	a.	Rumah tangga dengan akses air minum layak masih rendah. Persentase ruta dengan akses air minum tahun 2020 67,69%
		b.	Rumah tangga dengan akses sanitasi layak belum mencapai 100%. Persentase ruta dengan sanitasi layak sebesar 85,69%
		c.	Luas permukiman kumuh masih tinggi. Luas permukiman kumuh tahun 2020 sebesar 141,308
		d.	Rumah tidak layak huni tinggi, tahun 2020 ada sebanyak 5.694 rumah tidak layak huni tersebar di 24 kecamatan

NO	URUSAN	PERMASALAHAN	
5.	Ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat	a.	Masih banyaknya perda tertib trantibum yang dilanggar
6.	Sosial	a.	Rumah tangga dengan status kesejahteraan di desa 0,1 dan 2 masih tinggi. Jumlah rumah tangga dengan status kesejahteraan rendah sebesar 14.581 rumah tangga
		b.	Masih ada penduduk miskin yang belum memiliki jaminan/ansuransi kesehatan gratis. Persentase penduduk yang belum memiliki jaminan/asuransi kesehatan gratis dan memanfaatkan setahun terakhir 2020 masih 29,37%
II	Urusan wajib bukan pelayanan dasar		
7.	Tenaga kerja	a.	Masih tingginya tingkat pengangguran terbuka khususnya perempuan. TPT Pada tahun 2020 4,48%, TPT Perempuan 5,42%
		b.	masih rendahnya produktivitas tenaga kerja kabupaten Lahat. Persentase penduduk kabupaten Lahat yang berkerja kurang dari 35 jam seminggu masih 34,8%
8.	Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	a.	Masih adanya kasus kekerasan perempuan dan anak. Persentase penurunan dan anak dari tindakan kekerasan tahun 2020 0,37 %
9.	Pangan	a.	Masih ada 6 kecamatan dengan konsumsi normative kategori deficit rendah. Kecamatan Merapi Timur, Merapi Barat, Lahat, Gumay Talang, Kikim Barat, dan Kikim Timur tahun
10.	Lingkungan hidup	a.	Belum adanya penghitungan indeks kualitas udara
11.	Administrasi pendudukan dan catatan sipil	a.	Persentase penerbitan E-KTP Belum mencapai 100%, yaitu 97,56% pada tahun 2020
12.	Pemberdayaan masyarakat dan desa	a.	Masih banyak jumlah desa di kabupaten Lahat yang masuk ke kategori tertinggal dan sangat tertinggal menurut indeks desa membangun tahun 2020.
13.	Komunikasi dan informasi	a.	Masih belum optimalnya koordinasi sata data kabupaten Lahat
14.	Statistic	a.	Masih terbatasnya penghimpunan data sektoral kabupaten Lahat
15.	Koperasi, usah kecil dan menengah	a.	Kondisi sistem penduduk bagi usah mikro kecil menengah sebesar 66,53% di tahun 2020
16.	Penanaman modal	a.	Masih rendahnya persentase aparaturnya yang mendapatkan sertifikasi di bidang perizinan

		sampai dengan tahun 2020 hanya 6 orang padahal jumlah investasi PMA dan PMDN terus meningkat setiap tahunnya.
--	--	---

NO	URUSAN	PERMASALAHAN	
17.	Perpustakaan	a.	Berkurangnya pengunjung dan pemijaman buku. Pada tahun 2020 jumlah pengunjung perpustakaan daerah berkurang 2020 jumlah pengunjung perpustakaan daerah berkurang 6.307 orang menjadi 37.975 dan jumlah buku yang dipijam menurun sebesar 20.004 buku
III	Urusan pemerintah pilihan		
18.	Pariwisata	a.	Belum adanya investasi di sektor pariwisata. Jumlah investasi di bidang pariwisata masih belim ada di tahun 2020
19.	Transmigrasi	a.	Capaian realisasi sertifikat hak milik tanah transmigrasi belim 100%,
21.	Perindustrian	a.	Sektor ekonomi kreatif masih berpusat pada kuliner. Industry kratif hanya industru kuliner mendominasi sebesar 70% di tahun 2020
22.	Pertanian	a.	Menurutnya jumlah produksi jenis tanaman pangan dan luias panen di tahun 2020 luas panen padi menurun sebesar 13.510 Ha, produksi padi menurun sebesar 70.738 ton, luas panen kedelai menurun 400 Ha, produksi menurun 13.510 ton, luas panen kacang hijau berkurang 27 Ha, produksi berkurang sebesar 43,52 ton, panen ubi kayu berkurang 10 Ha, produksi berkurang sebesar 1.093,22 ton, luas panen ubi jalur berkurang 23 Ha, produksi berkurang 1.339,43 ton
IV	Urusan penujangan pemerintahan		
23.	Perencanaan pembangunan	a.	Belum terlaksananya intergrasi aplikasi sistem perencana dengan sistem penganggaran. Perlunya dukungan legislative untuk dapat mendukung program-program yang telah direncanakan bersama eksekutif yang telah dituangkan dalam sistim perencana sehinga dapat sejalan dan kosisten untuk penganggaran
		b.	Belim optimalnya sinergi sumber-sumber pemmbiyayaan pembangunan,baiik pemerintahan (APBN,APBD Provinsi, APBD Kab/kota) dan non

			Pemerintah (KPBU, CSR, DII). Maka pemerintah mencari sumber pendaan lainnya seperti melalui pinjaman PEN dalam meningkatkan pemulihan ekonomi masyarakat untuk pemulihan perekonomian nasional dan melalui program hibah.
24.	Keuangan	a.	Belum optimalnya penerimaan dari sektor pendapatan asli daerah (PAD).

NO	URUSAN	PERMASALAHAN	
5.	Kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan	a.	Persentase ASN yang telah mengikuti diklat baru mencapai 45%
		b.	Persentase pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan manajerial baru sebesar 35%
26.	Pelatihan dan pengembangan	a.	Budaya inovasi masih rendah
		b.	Belum ada hasil penelitian yang dapat digunakan secara optimal
27.	Pengawasan	a.	Belum adanya survey indeks integritas pada pemerintah provinsi Sumatera Selatan,

Sumber : Perubahan RPJMD Kabupaten Lahat Tahun 2022

D. ISU STRATEGIS DAERAH

Isu Strategis Daerah Dalam Rpjmd Kabupaten Lahat Tahun 2019-2023 Dengan memperhatikan analisa lingkungan eksternal dan internal yang ada, maka isu strategis daerah Kabupaten Lahat dalam lima tahun kedepan sebagai berikut :

1. Penurunan Angka Kemiskinan

Secara kuantitas perkembangan jumlah penduduk yang hidup dibawah garis kemiskinan di Kabupaten Lahat menunjukkan trend yang menurun walaupun di tahun 2020 persentase kemiskinan di Kabupaten Lahat menunjukkan peningkatan sebesar 0,03 persen menjadi 15,95 % di tahun 2020. Kabupaten Lahat tetap menjadi tiga besar dalam hal persentase kemiskinan diantara 17 Kabupaten/Kota lainnya di Sumatera Selatan. Kabupaten Lahat merupakan salah satu kabupaten dengan tingkat kemiskinan ekstrem yang tinggi (Di atas rata-rata) yaitu sebesar 8,02 % dengan besaran jumlah penduduk ekstrem miskin sebesar 33.06 jiwa di Tahun 2020 seperti yang dapat dilihat di grafik I.1 Nilai ini jauh lebih besar dengan tingkat kemiskinan ekstrem provinsi Sumatera Selatan yang sebesar 5,32 atau sebesar 454.6 jiwa.

Grafik 1.1
Pengelompokan wilayah berdasarkan persentase Penduduk Miskin Ekstrem (%) dan Jumlah Penduduk Miskin Ekstrem (jiwa) menurut Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2020

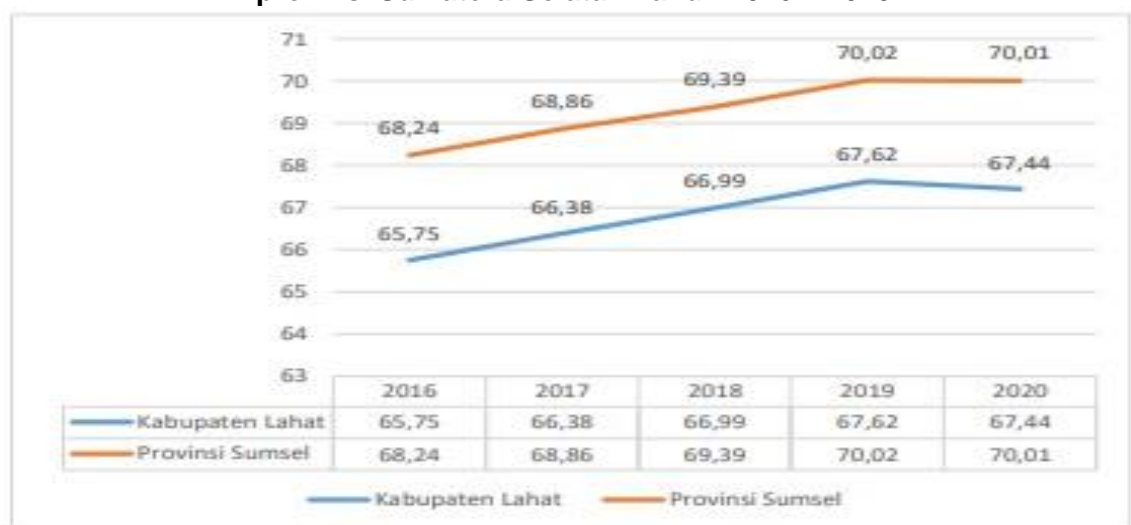


Sumber: Perubahan RPJMD Kabupaten Lahat Tahun 2022

Kabupaten Lahat yang berada pada kuadran 4 (kanan bawah) dikategorikan sebagai kabupaten dengan tingkat kemiskinan ekstrem tinggi (di atas rata-rata) namun porsi belanja kesejahteraan yang rendah. Untuk bidang-bidang yang berkaitan erat dengan peningkatan kesejahteraan (pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, perumahan dan fasilitas umum), porsi alokasi daerah-daerah tersebut umumnya masih sangat rendah di bawah rata-rata dari keseluruhan daerah di provinsi yang bersangkutan. Hal ini disebabkan derajat otonomi fiskal Kabupaten Lahat yang rendah sehingga semakin kecil porsi PAD dalam keseluruhan pendapatan suatu daerah yang dapat berimplikasi pada semakin tingginya ketergantungan suatu daerah terhadap transfer dari pusat.

grafik I.3 menunjukkan perkembangan yang linier terhadap Provinsi Sumatera Selatan walau pun indeks pembangunan manusia Kabupaten Lahat masih di bawah Provinsi Sumatera Selatan. Sasaran pembangunan daerah diantaranya yaitu menciptakan lingkungan yang memungkinkan masyarakat menikmati umur yang Panjang, sehat, dan menjalankan kehidupan yang produktif. Rata-rata peningkatan IPM Kabupaten Lahat selama 5 tahun terakhir adalah sebesar 0,6 poin. Hal ini menunjukkan peningkatan IPM Kabupaten Lahat bisa dikatakan stagnan bahkan capaian IPM Kabupaten Lahat menurun sebesar 0,18 poin menjadi 67,44 di Tahun 2020 dari tahun 2019. Hal ini tentu saja tidak terlepas dari ketiga dimensi yang ada di IPM yang saling berkaitan satu sama lain, yaitu Pendidikan, Kesehatan, dan pengeluaran perkapita.

Grafik I.3
Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Lahat terhadap provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016 – 2020



Sumber: Perubahan RPJMD Kabupaten Lahat Tahun 2022

a. Pendidikan

Aspek Pendidikan merupakan aspek penting dalam pembangunan kualitas sumber daya manusia. Dengan tingginya tingkat Pendidikan, kesempatan untuk

mendapatkan pekerjaan dan penghasilan yang lebih baik terbuka lebar. Dari Tabel 4.2 di atas dapat dilihat bahwa Kabupaten Lahat mengalami kendala pada indikator-indikator Pendidikan pembentuk IPM yang perkembangannya cenderung melambat. Angka Harapan Lama Sekolah Kabupaten Lahat tidak bergerak dari angka 12 selama 8 tahun terakhir. Begitu juga dengan Rata-rata Lama Sekolah yang waktu tempuh Pendidikan penduduk rata-rata 25 tahun ke atas tidak beranjak dari angka 8 tahun atau setara dengan SMP kelas 3.

Begitu juga dengan Indikator Pendidikan lainnya seperti APS, APM, APK, Rasio Murid terhadap Sekolah, dan Rasio Murid terhadap Guru. Upaya memperluas jangkauan pelayanan Pendidikan semakin rendah pada usia 16-18 tahun, kualitas Pendidikan yang diberikan guru terhadap murid juga menurun di level SMP dan SMA dan daya tampung sekolah juga semakin menurun di tingkat SD. Hal ini diperparah dengan masih cukup tingginya persentase penduduk yang tidak punya ijazah SD sebesar 17,59 persen.

b. Kesehatan

Aspek Kesehatan juga tidak kalah pentingnya dalam pembangunan kualitas sumber daya manusia. Di Tahun 2020, Angka Harapan Hidup di Kabupaten Lahat memang menunjukkan peningkatan secara kontinyu selama beberapa tahun terakhir. Namun demikian, rasio fasilitas Kesehatan terhadap penduduk semakin meningkat. 1 fasilitas Kesehatan harus melayani 4.216 jiwa di Kabupaten Lahat. Hal ini tentunya berdampak pada kinerja pelayanan Kesehatan yang ada. Hal ini diperburuk dengan meningkatnya angka kesakitan (morbiditas) Kabupaten Lahat di Tahun 2020 menjadi 33,85. Kasus balita stunting juga menjadi permasalahan dengan nilai prevalensi stunting yang tinggi di angka 22,44 %. Hal ini dapat dilihat dari meningkatnya persentase Gizi Buruk di Kabupaten Lahat dan Persentase BBLR di Tahun 2020.

3. Peningkatan Investasi Berbasis Potensi Sumber Daya Lokal

Investasi merupakan salah satu variabel pembentuk pertumbuhan ekonomi suatu daerah di samping tingkat konsumsi, pengeluaran pemerintah, dan ekspor impor. Kabupaten Lahat memiliki potensi yang sangat besar dalam investasi yang tidak hanya pada sektor pertambangan, industri mineral dan perdagangan saja

namun juga ada potensi local lainnya yang bisa mendongkrak perekonomian di Kabupaten Lahat, yaitu pariwisata.

Grafik I.4

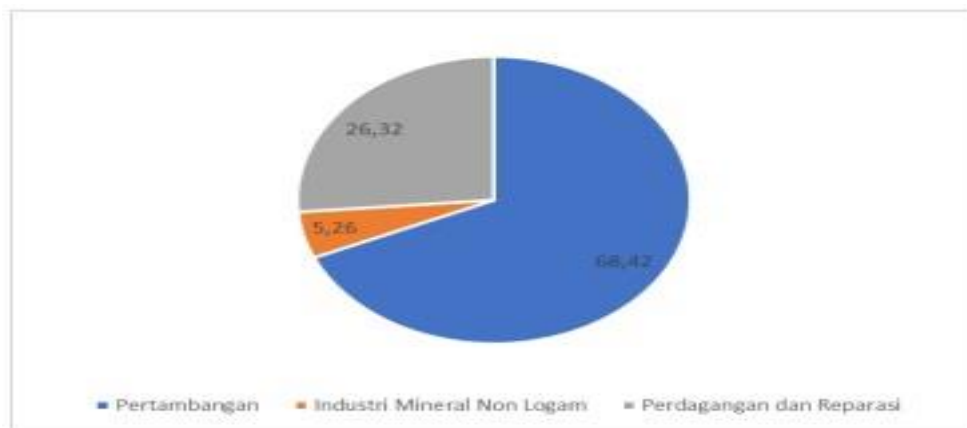
Distribusi Persentase PMDN Kabupaten Lahat Tahun 2020



Sumber: Perubahan RPJMD Kabupaten Lahat Tahun 2022

Grafik I.5

Distribusi Persentase PMA Kabupaten Lahat Tahun 2020



Sumber: Perubahan RPJMD Kabupaten Lahat Tahun 2022

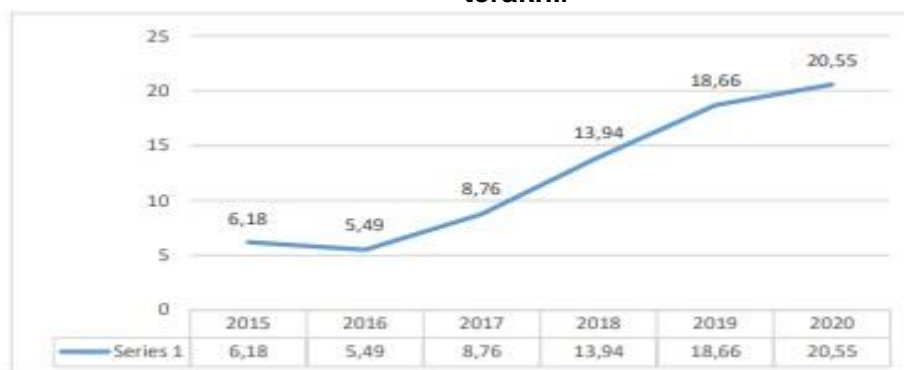
Dari kedua grafik di atas menunjukkan bahwa masih kurangnya investasi di sektor pariwisata di Kabupaten Lahat padahal Kabupaten Lahat memiliki potensi yang luar biasa besar dalam pengembangan destinasi pariwisata di wilayah Sumatera Selatan. Kebijakan investasi daerah yang berbasis sumber daya lokal diharapkan dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi melalui penciptaan nilai tambah potensi daerah, menciptakan lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat, meningkatkan pendapatan dan memperbaiki distribusi pendapatan masyarakat, meningkatkan daya saing ekonomi daerah terhadap daerah lain, dan membangun kerjasama antar

daerah, serta peningkatan investasi di Kabupaten Lahat yang didukung dengan pelayanan perizinan yang cepat, tepat, dan transparan.

4. Pemulihan dan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Pasca Pandemi COVID-19

Pandemi COVID-19 merupakan hantaman besar terhadap penurunan perekonomian nasional maupun global. Pemerintah Pusat berusaha memulihkan perekonomian agar tetap di zona positif dengan melakukan optimalisasi belanja pemerintah. Adapun yang dilakukan oleh pemerintah pusat adalah memberikan hibah bagi usaha pemula serta menambah dana Lembaga Pengelola Dana Bergulir koeprasi dan UMKM yang digunakan untuk pinjaman murah bagi UMKM. Pemerintah juga memberikan subsidi bunga dan mempermudah persyaratan kredit atau pembiayaan bagi UMKM diantaranya melalui Kredit usaha Rakyat. Hal ini tentunya harus disikapi oleh Pemerintah Kabupaten Lahat dengan berupaya mendorong pengembangan usaha mikro yang dapat membantu masyarakat yang mengalami pemutusan hubungan kerja dan kehilangan penghasilan akibat pandemi. Berdasarkan grafik I.6, pemerintah Kabupaten Lahat telah berusaha mendorong pengembangan usaha mikro ini. Dari grafik I.6 dapat dilihat bahwa persentase rumah tangga yang mendapatkan kredit usaha tani tumbuh secara signifikan.

Grafik 1.6
Persentase Rumah Tangga yang pernah mendapatkan kredit usaha tani setahun terakhir



Sumber: Perubahan RPJMD Kabupaten Lahat Tahun 2022

Hal ini tentunya diharapkan dapat meningkatkan produktivitas petani dalam rangka pemulihan ekonomi pasca pandemi karena data Dinas pertanian menunjukkan bahwa

selama pandemi telah terjadi penurunan produktivitas pertanian secara signifikan sebagaimana yang dapat dilihat di grafik I.7 di bawah ini.

Grafik I.7

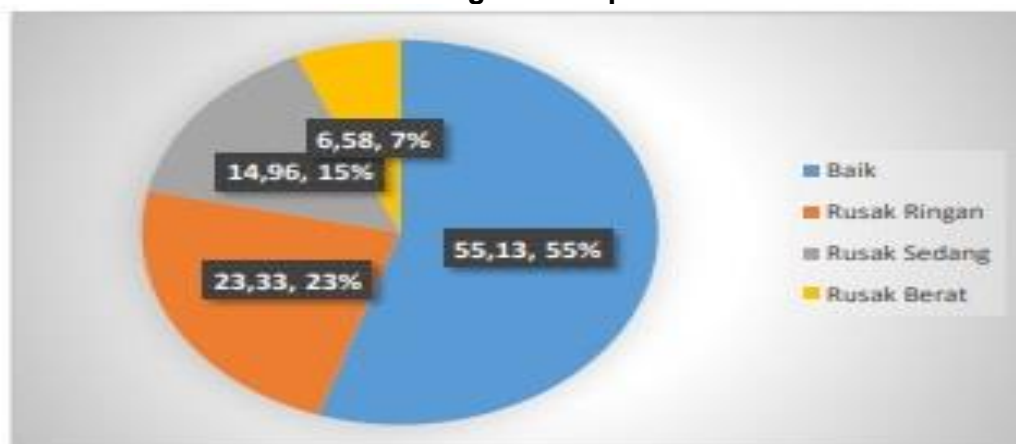
Realisasi hasil produksi tanaman pangan Kabupaten Lahat Tahun 2016-2020



Sumber: Perubahan RPJMD Kabupaten Lahat Tahun 2022

Salah satu penunjang produktivitas pertanian adalah irigasi. Kondisi irigasi Kabupaten Lahat di Tahun 2020 seperti yang ditunjukkan pada grafik I.8 mendeskripsikan bahwa kurang lebih 44 % kondisi irigasi di Kabupaten Lahat rusak (rusak ringan 23,33%, rusak sedang 14,96%, rusak berat 6,58%).

Grafik 1.8
Persentase Kondisi Irigasi Kabupaten Lahat Tahun 2020



Sumber: Perubahan RPJMD Kabupaten Lahat Tahun 2022

5. Penurunan Tingkat Pengangguran dan setengah pengangguran

Berdasarkan aspek ekonomi, pengangguran dapat diartikan sebagai ketidakmampuan bursa kerja dalam menyerap angkatan kerja yang tersedia. Ketersediaan lapangan kerja yang terbatas tidak mampu menyerap para pencari kerja yang bertambah seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk terutama usia muda mengingat Kabupaten Lahat sedang menikmati Bonus Demografi, yaitu suatu keadaan dimana penduduk usia produktif jauh lebih banyak daripada penduduk usia non produktif.

a. Tingkat Pengangguran Terbuka

Tabel I.2

**Tingkat Pengangguran Terbuka Penduduk Usia 15 tahun ke atas
Menurut jenis kelamin Tahun 2015-2022**

Tahun	Jenis Kelamin		L + P (%)
	Laki – Laki (%)	Perempuan (%)	
2015	4,04	4,58	4,26
2016	n/a	n/a	n/a
2017	4,43	4,16	4,33
2018	3,31	3,25	3,29
2019	3,95	3,14	3,64
2020	3,36	5,42	4,18

Sumber : BPS Kabupaten Lahat Tahun 2022

Tingkat pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Lahat di akhir tahun 2020 mengalami peningkatan 0,54 persen dari tahun 2019 menjadi 4,18%. Berdasarkan jenis kelamin, TPT laki-laki lebih kecil daripada perempuan. TPT Laki-laki menurun dari tahun 2019 sebesar 0,51 % sedangkan TPT Perempuan meningkat signifikan sebesar 2,28 %.

Fenomena ini dipicu oleh dampak Pandemi COVID-19 yang mempengaruhi seluruh aktivitas perekonomian di Kabupaten Lahat yang berakibat pada penurunan kinerja perekonomian dengan efek seperti pemutusan hubungan kerja,

tutupnya aktivitas perdagangan, dan berkurangnya ketersediaan lapangan pekerjaan terutama lapangan pekerjaan bagi perempuan di Kabupaten Lahat.

b. Setengah Pengangguran

Setengah pengangguran adalah tenaga kerja yang tidak bekerja secara optimal dengan jam kerja kurang dari 35 jam seminggu yang berakibat pada rendahnya produktivitas yang diakibatkan dari skill yang dimiliki tidak sesuai dengan jenis pekerjaan yang diharapkan.

Tabel I.3
Persentase penduduk yang bekerja kurang dari 35 jam seminggu
Tahun 2017-2020

Tahun	Jenis Kelamin		L + P (%)
	Laki – Laki (%)	Perempuan (%)	
2017	20,74	39,59	28,29
2018	20,27	38,94	27,92
2019	33,08	48,64	39,09
2020	29,53	42,99	38,80

Sumber : BPS Kabupaten Lahat Tahun 2022

Dari tabel I.3 dapat dilihat bahwa Kabupaten Lahat memiliki tenaga kerja dengan produktivitas rendah sebesar 38,80 persen dari total tenaga kerja yang ada di Kabupaten Lahat. Produktivitas tenaga kerja perempuan cenderung lebih rendah daripada produktivitas tenaga kerja laki-laki.

6. Konektivitas dan Infrastruktur Dasar

a. Konektivitas

Penguatan konektivitas perlu terus dilakukan terutama untuk membangun akses yang lebih merata di seluruh wilayah Kabupaten Lahat. Kabupaten Lahat membutuhkan jaringan konektivitas fisik yang efisien dan berkualitas. Konektivitas fisik tersebut meliputi jalan, kereta api, terminal, dan jaringan konektivitas digital yang andal dan efisien. Tersedianya infrastruktur yang memadai secara merata di Kabupaten Lahat dan kabupaten/kota penyangga, yang berbiaya terjangkau, dapat dengan segera menurunkan biaya logistik sehingga meningkatkan kemudahan usaha

dan daya saing perekonomian secara keseluruhan. Usaha penguatan konektivitas fisik yang dilakukan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan saat ini, antara lain pengembangan jalan nasional dan jalan provinsi, penambahan jalan tol, jalur kereta api, pengembangan dan pembangunan pelabuhan/terminal di seluruh Indonesia. Selain itu, Pemerintah juga merencanakan untuk meningkatkan konektivitas digital melalui pengembangan jaringan pita lebar (bandwidth) yang mencakup seluruh wilayah Indonesia. Usaha Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan tersebut tentunya perlu didukung oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lahat dan stakeholder terkait. Meskipun telah terdapat kesadaran akan adanya kebutuhan penguatan konektivitas di seluruh Indonesia serta berbagai usaha mencapainya, disadari bahwa tantangan untuk memperkuat infrastruktur konektivitas masih menghadang. Untuk itulah diperlukan koordinasi yang semakin kuat antara berbagai elemen masyarakat, pihak swasta dan Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah, untuk menemukan solusi terbaik untuk mengatasi berbagai tantangan yang ada.

Pembangunan konektivitas dan infrastruktur dasar merupakan hal yang sangat penting karena dengan infrastruktur yang memadai dan hubungan antar daerah yang lancar dapat mendorong seluruh aspek, baik pertumbuhan ekonomi, pariwisata, sosial dan investasi. Pembangunan konektivitas Kabupaten Lahat yang telah dilaksanakan di antaranya pembangunan jalan di wilayah perbatasan, jalan antara kecamatan dan antar desa serta jalan penghubung ke daerah pelosok perdesaan baik yang menggunakan dana APBN, DAK maupun APBD Kabupaten Lahat.

Saat ini, hubungan kebutuhan infrastruktur jalan pada masyarakat Kabupaten Lahat bisa diukur dengan rasio panjang jalan dengan jumlah penduduk yang ada. Sementara rasio panjang jalan dengan jumlah penduduk diperoleh dengan membagi jumlah penduduk (ribu jiwa) suatu wilayah dengan panjang jalan (km). Rasio ini memiliki arti 1 km jalan di wilayah tersebut berbanding dengan akses untuk melayani sejumlah ribu jiwa penduduk. Semakin tinggi nilai rasio, maka semakin tinggi pula jumlah masyarakat yang dilayani. Rasio panjang jalan dengan jumlah penduduk berdasarkan kewenangan Pemerintah Kabupaten Lahat adalah 309 jiwa/km. Artinya layanan panjang jalan untuk bisa menopang potensi ekonomi di wilayah Kabupaten Lahat cukup memadai.

Tabel I.4
Rasio Panjang Jalan terhadap Jumlah Penduduk Kabupaten Lahat (ribu jiwa/km)

Jenis Jalan	Panjang Jalan	Jumlah Penduduk	Rasio Panjang Jalandengan Jumlah Penduduk
Jalan Nasional	184,77	430.071	2,327
Jalan Provinsi	131,81		3,2
Jalan Kabupaten	1.339,15		321,15
Jumlah	1.655,73	430.071	259,74

Sumber: Perubahan RPJMD Kabupaten Lahat Tahun 2022

Tabel I.5
Rasio Panjang Jalan terhadap Luas Wilayah di Kabupaten Lahat

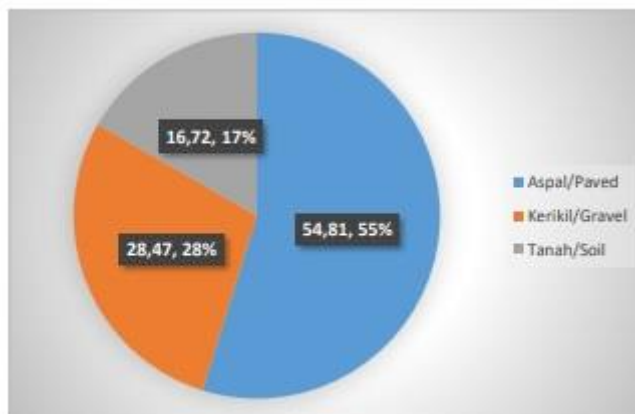
Jenis Jalan	Panjang Jalan	Luas Wilayah	Rasio Panjang Jalan dengan Luas Wilayah
Jalan Negara	184,77	4.361,83	0,042
Jalan Provinsi	131,81		0,030
Jalan Kabupaten	1.339,15		0,3
Jumlah	1.655,73	4.361,83	0,36

Sumber: Perubahan RPJMD Kabupaten Lahat Tahun 2022

Nilai indeks aksesibilitas atau ketersediaan jaringan jalan yang mudah diakses oleh masyarakat Kabupaten Lahat sebesar 0,36 (1.655,73 km/4.361,83 km²) atau 29% dari jalan yang ada. Nilai indeks aksesibilitas dihitung dengan rumus panjang jalan/ luas wilayah (km/km²), sedangkan besaran parameter kinerja SPM (sumber kepmenkimpraswil No. 534/KPTS/M/2001) untuk indeks aksesibilitas terbagi atas tingkat pelayanannya yang didasarkan pada kepadatan penduduk (jiwa/km²) maka Kabupaten Lahat dengan jumlah penduduk 430.071 jiwa dengan kepadatan penduduk 92,0 jiwa/km² dan nilai aksesibilitas 0,3 termasuk dalam kategori tingkat pelayanan rendah (Parameter SPM : kepadatan penduduk).

Adapun yang menjadi permasalahan mendasar saat ini adalah menyangkut panjang jalan berdasarkan jenis permukaan dan kondisi jalan yang ada di Kabupaten Lahat. Dari panjang jalan kabupaten yang ada 1339,15 Km, 45,17 % diantaranya masih berupa jalan kerikil dan jalan tanah (Tabel I.5).

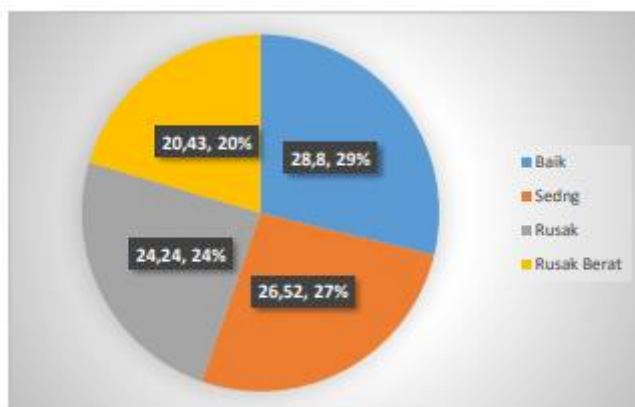
Grafik I.9
Persentase Jalan menurut Jenis Permukaan Jalan
Kabupaten Lahat Tahun 2020



Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lahat, diolah

Sedangkan jika dilihat berdasarkan kondisi jalan maka terdapat 24,24 % jalan berkondisi rusak dan 20,43% dalam kondisi rusak berat (grafik I.10).

Grafik I.10
Persentase Panjang Jalan menurut Kondisi Jalan Kabupaten Lahat Tahun 2020



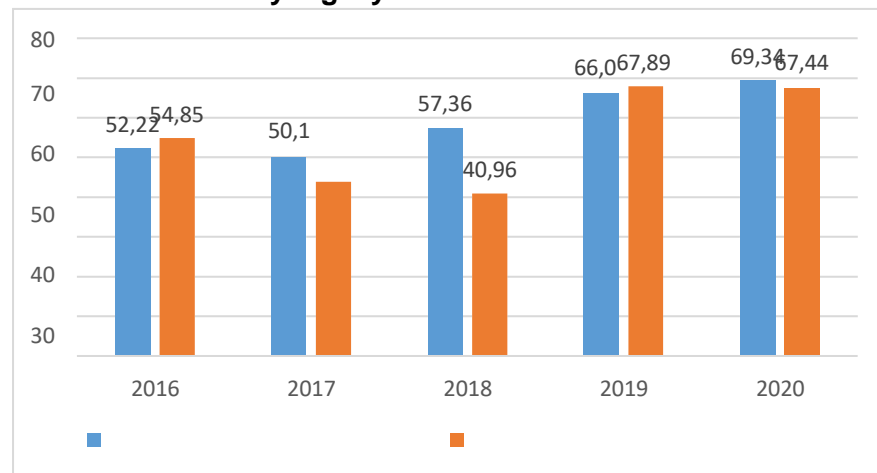
Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lahat, diolah

b. Infrastruktur Dasar

Infrastruktur dasar merupakan salah satu dimensi kesejahteraan rumah tangga. Kebutuhan akan perumahan merupakan salah satu kebutuhan pokok setiap orang selain sandang dan pangan. Dengan kata lain, infrastruktur dasar telah menjadi kebutuhan primer yang harus dipenuhi. Beberapa aspek yang dapat digambarkan dari data infrastruktur dasar adalah kelayakan dan Kesehatan rumah yang pada akhirnya mempengaruhi Kesehatan masyarakat termasuk

penanganan stunting pun salah satu dimensinya adalah infastruktur dasar yaitu permukiman kumuh, sanitasi layak, air minum layak.

Grafik I.11
Persentase rumah tangga dengan sanitasi dan akses air minum yang layak Tahun 2016 - 2020

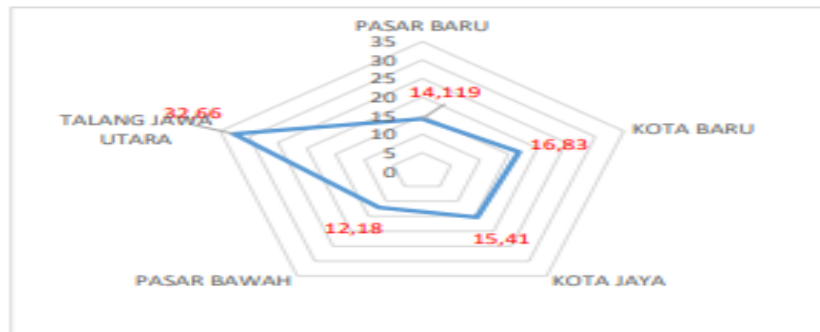


Sumber: Perubahan RPJMD Kabupaten Lahat Tahun 2022

Dari grafik di atas dapat dilihat kondisi eksisting ruta dengan akses air minum dan sanitasi yang layak. di Kabupaten Lahat. Dalam 2 tahun terakhir, kinerja pemerintah Kabupaten Lahat dalam meningkatkan akses ruta terhadap air minum dan sanitasi layak terlihat melambat, bahkan persentase ruta dengan akses air minum layak menurun sebesar 0,45 persen dari tahun sebelumnya yaitu 2019.

Sebaran Permukiman Kumuh di Kabupaten Lahat menurut SK Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Kabupaten Lahat Nomor: 050/107/KEP/BAPPEDA-III/2021 terletak di Kecamatan Lahat dan tersebar di 7 kelurahan seperti yang ditunjukkan dalam grafik I.12.

Grafik I.12
Luasan Kumuh (ha) Kabupaten Lahat Tahun 2021



Sumber : SK Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh
Kab.Lahat 2021 Nomor : 050/107/KEP/BAPPEDA-III/2021

Permasalahan Kabupaten Lahat lainnya yang berkaitan juga infrastruktur dasar adalah rumah tidak layak huni. Jumlah rumah tidak layak huni di Kabupaten Lahat terbilang cukup tinggi yaitu sebanyak 5.694 rumah dan tersebar di 23 kecamatan yang ada di Kabupaten Lahat seperti yang terlihat pada grafik I.13.

Berdasarkan grafik di bawah dapat dilihat bahwa sebaran rumah tidak layak huni didominasi di Kecamatan Kikim Area, Lahat, Tanjung Sakti, dan Mulak Ulu sedangkan Kecamatan Sukamerindu tidak ada rumah yang tidak layak huni.

Grafik I.13

Rumah Tidak Layak Huni Kabupaten Lahat Tahun 2021

gambaran umum Organisasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lahat dan menjabarkan permasalahan pembangunan daerah.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Meliputi Rencana Strategi; Indikator Kinerja Utama dan Perjanjian Kinerja Tahun 2023. Bab II ini menjelaskan beberapa hal penting dalam perencanaan dan perjanjian kinerja Tahun 2023.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Meliputi Capaian Kinerja Organisasi dan Realisasi Anggaran. Bab III ini menjabarkan mengenai analisis pencapaian kinerja Pemerintah Kabupaten Lahat dengan berpedoman pada Indikator kinerja Utama (IKU) serta uraian tentang indikator kinerja sesuai dengan dokumen perjanjian kinerja.

BAB IV PENUTUP

Bagian Penutup menjelaskan kesimpulan menyeluruh dari laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Lahat Tahun 2023 dan menguraikan rekomendasi yang diperlukan bagi perbaikan kinerja di masa datang.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS

1. Visi dan Misi

a. Visi Kabupaten Lahat :

Sebagai Konsekuensi logis dari dinamika perubahan lingkungan yang begitu cepat dan tuntutan masyarakat akan pelayanan prima mendorong Pemerintah Kabupaten Lahat perlu secara terus menerus mengembangkan peluang dan inovasi agar tetap eksis dan unggul dengan senantiasa mengupayakan perubahan kearah perbaikan. Perubahan tersebut harus disusun dalam tahapan yang terencana, konsisten dan berkelanjutan sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil atau manfaat.

Untuk itu diperlukan visi sebagai cara pandang ke depan tentang kemana Pemerintah Kabupaten Lahat akan diarahkan dan apa yang akan dicapai. Dengan mempertimbangkan kemajuan yang telah dicapai pada periode 2013 – 2018; memperhatikan hasil analisis isu strategis; mengacuh pada visi dan misi Bupati/Wakil Bupati Lahat terpilih Tahun 2019 – 2023; berpedoman pada RPJPD Kabupaten Lahat 2005 - 2025; memperhatikan prioritas pembangunan Provinsi Sumatera Selatan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD); merujuk pada tujuan nasional yang tercantum dalam Pembukaan Undang-undang Dasar 1945, serta memperhatikan tujuan pembangunan berkelanjutan maka Visi Pembangunan Kabupaten Lahat Tahun 2019 – 2023 adalah :

“Mewujudkan Masyarakat Kabupaten Lahat yang Berakhlak, Mandiri, Berkeadilan, Makmur dan Sejahtera serta Terselenggaranya Pembangunan yang Berbasis Pemerataan Berkelanjutan”.

a. Makna dari visi Pemerintah Kabupaten Lahat :

Visi tersebut mengandung beberapa kata kunci yaitu "**Berakhlak, Mandiri, Berkeadilan, Makmur dan Sejahtera**". Visi perlu dijelaskan agar memberikan pengertian dan persepsi yang sama bagi setiap anggota organisasi dan *stakeholders*, serta berbagai pihak yang berkepentingan, adapun penjelasannya adalah sebagai berikut:

- 1) **Berakhlak**; mengandung pengertian bahwa Kabupaten Lahat menginginkan agar terwujudnya peningkatan akhlak mulia, baik secara individual maupun social dalam konteks iman dan taqwa karena kualitas sumber daya manusia dalam mewujudkan kesejahteraan tanpa iman dan taqwa hanya akan menjerumuskan dalam jurang kehancuran. Perwujudan pokok visi ini ditandai dengan meningkatnya pelaksanaan ibadah dan pengamalan nilai-nilai agama dalam segala aspek kehidupan baik secara individual maupun social;
- 2) **Mandiri**; inti dari bagian visi mandiri adalah terjadinya proses pembangunan yang diarahkan untuk mewujudkan Lahat sebagai wilayah yang mandiri. Sebagai Kabupaten yang dicita-citakan mandiri, diharapkan akan mampu mewujudkan kehidupan sejajar dan sederajat dengan daerah lain yang telah maju dengan mengandalkan pada kemampuan dan kekuatan sendiri.

- 3) **Berkeadilan**; bermakna bahwa pembangunan Kabupaten Lahat bertujuan mensejahterakan masyarakat secara adil dan merata tidak nepotisme dan tidak mengabaikan hak orang lain. Adil juga berarti semua wilayah dan etnis, golongan dan agama mendapatkan pelayanan yang sama serta memiliki hak dan kewajiban yang sama baik dalam menerima pelayanan pembangunan maupun di depan hukum.
- 4) **Makmur dan Sejahtera**; adalah terwujudnya peningkatan lebih lanjut dari kondisi makmur, yang tidak hanya berdimensi material dan jasmaniah, tetapi juga spiritual atau rohaniah yang memungkinkan rakyat menjadi manusia yang utuh dalam menggapai cita-cita ideal dan berpartisipasi dalam proses pembangunan secara kreatif, inovatif dan konstruktif dalam tata kehidupan (juga tata pemerintahan) yang aman dan tenteram, rukun dan damai, di samping terpenuhinya kebutuhan dasar sandang, pangan, papan, pendidikan, kesehatan dan lapangan kerja, bebas dari ketakutan dan belenggu diskriminasi, serta bebas dari penindasan, dengan sumber daya manusia yang makin berkualitas secara fisik, psikis maupun intelektual. Masyarakat yang sejahtera adalah masyarakat yang hidup dalam situasi dan kondisi aman, tenteram, damai sentosa dan makmur. Perwujudan pokok visi ini ditandai oleh peningkatan pendapatan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, perasaan tenang dan aman dalam hidupnya.

b. Misi Kabupaten Lahat:

Berdasarkan visi pembangunan tersebut ditetapkan misi pembangunan Kabupaten Lahat Tahun 2019 – 2023, sebagai berikut:

- 1) Menciptakan pemerintahan yang bersih dan inovatif;

- 2) Meningkatkan pembangunan infrastruktur public berbasis pada pemerataan wilayah yang memadai dan efektif;
- 3) Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berakhlak, sehat, cerdas, terampil dan berkepribadian luhur;
- 4) Menumbuh kembangkan perekonomian rakyat, menuju kedaulatan sumber daya alam yang tersedia;
- 5) Memperkokoh kerukunan kehidupan beragama dan budaya yang lestari.

2. Tujuan dan Sasaran

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab permasalahan pembangunan daerah dan isu strategis pembangunan daerah. Sedangkan yang dimaksud dengan sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun kedepan.

Berdasarkan Peraturan Bupati Lahat Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lahat Tahun 2019 – 2023, tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Lahat yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang dirumuskan berdasarkan visi dan misi Kabupaten Lahat terdapat 17 (tujuh belas) sasaran sebagai berikut :

Misi I : Menciptakan pemerintahan yang bersih dan inovatif;

Tujuan : Meningkatnya Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (*good government*) dan Pemerintahan yang Bersih (*clean governance*).

Sasaran : 1. Meningkatnya pelayanan prima bagi masyarakat;

2. Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan capaian kinerja pembangunan - pembangunan yang transparan dan akuntabel.

Misi 2 : Meningkatkan pembangunan infrastruktur publik berbasis pada pemerataan wilayah yang memadai dan efektif;

Tujuan : Meningkatnya Kapasitas Infrastruktur dan Sarana/Prasarana.

Sasaran :

1. Meningkatnyakapasitas infrastruktur wilayah;
2. Terbangunnya jaringan infrastruktur perhubungan yang terpadu dan merata ke seluruh wilayah;
3. Meningkatnya kualitas dan kuantitas jaringan irigasi, rawa serta jaringan irigasi lainnya;
4. Tersedianya sarana dan prasana dasar permukiman;
5. Terwujudnya kesesuaian pemanfaatan ruang;
6. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup.

Misi 3 : Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berakhlak, sehat, cerdas terampil dan berkepribadian luhur;

Tujuan : Meningkatnya kualitas manusia dengan seutuhnya.

Sasaran :

1. Meningkatnyaderajat kesehatan masyarakat;
2. Meningkatnya akses dan kualitas pendidikan;
3. Meningkatnya prestasi pemuda dan olahraga;
4. Terbangunnya perempuan, anak dan lansia yang berkualitas dan berdaya saing dalam pembangunan.

Misi 4 : Menumbuhkembangkan perekonomian rakyat, menuju kedaulatan sumber daya alam yang tersedia;

Tujuan : Meningkatnya pendapatan masyarakat dan kesejahteraan sosial.

Sasaran : 1. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi;
2. Meningkatnya kesejahteraan sosial;
3. Meningkatnya kesempatan kerja.

Misi 5 : Memperkokoh kerukunan kehidupan beragama dan budaya yang lestari;

Tujuan : Terwujudnya masyarakat yang berakhlak mulia

Sasaran : 1. Meningkatnya nilai keagamaan masyarakat;
2. Terwujudnya budaya sebagai identitas spesifik daerah.

B. INDIKATOR KINERJA UTAMA

Pemerintah Kabupaten Lahat berdasarkan Peraturan Bupati Lahat Nomor 33 Tahun 2021 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lahat telah menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai ukuran keberhasilan dalam mencapai sasaran strategis organisasi. Penetapan IKU tersebut telah mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Lahat Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lahat Tahun 2019 – 2023.

Maksud penetapan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lahat adalah untuk mengukur keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis serta untuk meningkatkan kinerja instansi pemerintah. Tujuan penetapan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lahat adalah:

a. Untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam penyelenggaraan manajemen kinerja secara baik;

b. Untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah yang digunakan sebagai perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lahat Tahun 2019–2023. Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Lahat Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut :

TABEL II.1.
INDIKATOR KINERJA UTAMA KABUPATEN LAHAT TAHUN 2023

NO.	SASARAN RPJMD	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SKPD PENANGGUNG JAWAB	KETERANGAN	SUMBER DATA
1.	Meningkatnya Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih (good government) dan Pemerintahan yang Bersih (good governance)	Indeks Reformasi Birokrasi	Seluruh OPD di bawah Koordinator Setda Bagian Organisasi	<i>Reformasi birokrasi dilaksanakan pada aparatur pemerintah melalui pelaksanaan berbagai program dan kegiatan sebagaimana dituangkan dalam Grand Design Reformasi Birokrasi dan Roadmap Reformasi Birokrasi</i>	Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 Tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 – 2025; Data dari seluruh OPD
	1.1 Meningkatkan Pelayanan Prima bagi Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Seluruh OPD	<i>Data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya</i>	Permenpan RB No. 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik

NO.	SASARAN RPJMD	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SKPD PENANGGUNG JAWAB	KETERANGAN	SUMBER DATA
	1.2 Meningkatkan Pelayanan Prima bagi Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Seluruh OPD	<i>Data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari</i>	Permenpan RB No. 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Survey

				<i>aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya</i>	Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik
	1.3 Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Capaian Kinerja Pembangunan	Nilai SAKIP	Sekretariat Daerah (Bagian Organisasi)	AA (Memuaskan), dengan Skor 85 – 100, sedangkan A (Sangat Baik) Skornya 75 -85, B (Baik) dengan Skor 75-65, CC (Cukup Baik) dengan Skor 50 – 65, C (Agak Kurang) dengan Skor 30 – 50, dan Nilai D (Kurang) dengan Skor 0 – 30	Data BPKAD dan Inspektorat Permenpan & RB No. 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
2.	Mengurangi Ketimpangan Antarwilayah	Indeks Aksesibilitas	Dinas Perhubungan	$Q_i = \sum_{j=1}^n A_j \cdot F(i, j)$ <p>Keterangan :</p> <p>Q_i : Indeks aksesibilitas zona i ke semua zona lainnya</p> <p>A_j : Tarikan ke zona j</p> <p>F(i,j) : Faktor gesekan waktu perjalanan dari zona i ke zona j</p> <p>n : Total jumlah zona</p>	Data Dinas Perhubungan
	2.1 Meningkatkan kapasitas Infrastruktur wilayah	Persentase Panjang Jalan Kabupaten dalam Kondisi Mantap	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	$\frac{(\text{Panjang jalan kondisi baik} + \text{Panjang jalan kondisi sedang})}{\text{Total Panjang Jalan}} \times 100 \%$	Data Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

NO.	SASARAN RPJMD	INDIKATOR	SKPD	KETERANGAN	SUMBER
-----	---------------	-----------	------	------------	--------

		KINERJA UTAMA	PENANGGUNG JAWAB		DATA	
	2.2	Terbangunnya Jaringan Infrastruktur Perhubungan yang Terpadu dan Merata keseluruhan Wilayah	Rasio Konektivitas Kabupaten	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang / Dinas Perhubungan	Rasio konektivitas kabupaten = $(IK1 \times \text{bobot angkutan jalan}) + (IK2 \times \text{Bobot angkutan sungai danau dan penyeberangan})$ <ul style="list-style-type: none"> • IK1 (angkutan jalan) = (Jumlah trayek yang dilayani pada kabupaten x bobot trayek) dibagi (jumlah kebutuhan trayek pada kota/kabupaten tersebut). • IK2 (Angkutan sungai, danau dan penyeberangan) = (jumlah lintas penyeberangan yang beroperasi pada kabupaten / kota tersebut). 	Data Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang / Dinas Perhubungan
	2.3	Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Jaringan Irigasi, Rawa serta Jaringan Irigasi Lainnya	Rasio Jaringan Irigasi	Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan	$\frac{\text{Luas kondisi daerah irigasi baik} \times 100\%}{\text{Total luas daerah irigasi}}$	Data Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan
	2.4	Tersedianya Sarana dan Prasarana Dasar Permukiman	Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni	Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan	$\frac{\text{Jumlah seluruh rumah layak huni di suatu wilayah kerja} \times 100\%}{\text{Total izin yang diajukan}}$	Data Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan
	2.5	Terwujudnya Kesesuaian Pemanfaatan Ruang	Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	$\frac{\text{Jumlah pengajuan izin yang tidak sesuai dengan peruntukan} \times 100\%}{\text{Total izin yang diajukan}}$	Data Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	2.6	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup	$IKLH \text{ Kabupaten} = (30\% \times IKA) + (30\% \times IKU) + (40\% \times IKTL)$ Keterangan IKLH : Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Tingkat Kabupaten IKA : Indeks Kualitas Air IKU : Indeks Kualitas Udara IKTL : Indeks Kualitas Tutupan Lahan	Data Dinas Lingkungan Hidup

NO.	SASARAN RPJMD	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SKPD PENANGGUNG JAWAB	KETERANGAN	SUMBER DATA																				
3.	Meningkatkan Kualitas Manusia dengan Seutuhnya	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Diknasbud dan Dinkes	<p>IPM = 1/3 [Indeks X(1) + Indeks X(2) + Indeks X(3)]</p> <p>Keterangan</p> <p>X₁ : Indeks Harapan Hidup</p> <p>X₂ : Indeks Pendidikan = 2/3(Indeks Melek Huruf) + 1/3(Indeks Rata-rata Lama Sekolah)</p> <p>X₃ : Indeks Standar Hidup Layak</p> <p>Indeks $X_{i,j} = (X_{i,j} - X_{i_{min}}) / (X_{i_{max}} - X_{i_{min}})$</p> <p>X_(i,j) : Indikator ke-I dari daerah j</p> <p>X_{i-min} : Nilai minimum dari Xi</p> <p>X_{i-max} : Nilai maximum dari Xi</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Indikator Komponen IPM (=Xi)</th> <th>Nilai Maksimum</th> <th>Nilai Minimum</th> <th>Catatan</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Angka harapan hidup</td> <td>85</td> <td>25</td> <td>Sesuai standar global (UNDP)</td> </tr> <tr> <td>Angka melek huruf</td> <td>10</td> <td>0</td> <td>Sesuai standar global (UNDP)</td> </tr> <tr> <td>Rata-rata lama sekolah</td> <td>15</td> <td>0</td> <td>Sesuai standar global (UNDP)</td> </tr> <tr> <td>Konsumsi per kapita Yang disesuaikan 1996</td> <td>732.720</td> <td>300.000</td> <td>Sesuai standar global (UNDP)</td> </tr> </tbody> </table>	Indikator Komponen IPM (=Xi)	Nilai Maksimum	Nilai Minimum	Catatan	Angka harapan hidup	85	25	Sesuai standar global (UNDP)	Angka melek huruf	10	0	Sesuai standar global (UNDP)	Rata-rata lama sekolah	15	0	Sesuai standar global (UNDP)	Konsumsi per kapita Yang disesuaikan 1996	732.720	300.000	Sesuai standar global (UNDP)	Data Diknasbud dan Dinkes
Indikator Komponen IPM (=Xi)	Nilai Maksimum	Nilai Minimum	Catatan																						
Angka harapan hidup	85	25	Sesuai standar global (UNDP)																						
Angka melek huruf	10	0	Sesuai standar global (UNDP)																						
Rata-rata lama sekolah	15	0	Sesuai standar global (UNDP)																						
Konsumsi per kapita Yang disesuaikan 1996	732.720	300.000	Sesuai standar global (UNDP)																						
	3.1 Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Umur Harapan Hidup	Dinas Kesehatan	<i>Angka Perkiraan Lama Hidup Rata-rata Penduduk dengan Asumsi Tidak Ada Perubahan Pola Mortalitas menurut Umur</i>	Data Dinas Kesehatan																				
	3.2 Meningkatnya Akses dan Kualitas Pendidikan	Angka Harapan Lama Sekolah	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	$HLS_a^t = FKx \sum_{i=a}^n \frac{E_i^t}{P_i^t}$ <p>Dimana:</p> <p>HLS_a^t = Harapan Lama Sekolah pada umur a di tahun t</p> <p>E_i^t = Jumlah penduduk usia i yg bersekolah pd tahun t</p> <p>P_i^t = Jumlah penduduk usia i pada tahun t</p> <p>i = Usia (a, a+1,.....,n)</p> <p>FK = Faktor koreksi</p>	Data Dinas Pendidikan dan Kebudayaan																				
	3.3 Meningkatnya Prestasi Pemuda dan Olahraga	Jumlah atlet berprestasi	Dinas Pemuda dan Olahraga	<i>Banyaknya Atlet yang Berprestasi (Orang)</i>	Data Dinas Pemuda dan Olahraga																				
	3.4 Terbangunnya Perempuan, Anak, dan Lansia	Indeks Pembangunan Gender	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan	<p>IPG = 1/3 (Xede (1) + Xede (2) + linc-dis)</p> <p>Keterangan :</p>	Data Dinas Pemberdayaan																				

	yang Berkualitas dan Berdaya Saing dalam Pembangunan	(IPG)	Perlindungan Anak	Xede(1) : Xede untuk Harapan Hidup Xede(2) : Xede untuk Harapan Pendidikan Iinc-dis : Indeks Distribusi Pendapatan Variabel	Perempuan dan Perlindungan Anak
--	--	-------	-------------------	---	---------------------------------

NO.	SASARAN RPJMD	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SKPD PENANGGUNG JAWAB	KETERANGAN	SUMBER DATA
	4.1 Meningkatkan Pendapatan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial	Angka Kemiskinan	Dinas Sosial	$P_{\alpha} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^q \left[\frac{z - y_i}{z} \right]^{\alpha}$ <p>Keterangan α : = 0 z : garis kemiskinan y_i : Rata-rata pengeluaran perkapita sebulan yang berada dibawah garis kemiskinan <i>(i=1, 2, 3, ..., q), $y_i < z$</i> q : Banyaknya Penduduk yang Berada di Bawah Garis Kemiskinan n : Jumlah Penduduk</p>	Data Dinas Sosial
	4.1.1 Meningkatnya Kesejahteraan Sosial	Gini Ratio	Dinas Sosial	$GR = 1 - \sum f_i [Y_i + Y_i - 1]$ <p>Keterangan f_i = jumlah (%) penerimaan pendapatan kelas ke i. Y_i = jumlah kumulatif (%) pendapatan pada kelas ke i.</p> <p>Nilai GR terletak antara nol sampai dengan satu. Bila GR = 0, ketimpangan pendapatan merata sempurna, artinya setiap orang menerima pendapatan yang sama dengan yang lainnya bila GR=1 artinya ketimpangan pendapatan timpang sempurna atau pendapatan itu hanya diterima oleh satu orang atau satu kelompok</p>	Data Dinas Sosial
	4.1.2 Meningkatkan Kesempatan Kerja	Tingkat Pengangguran	Disnakertrans	$\frac{\text{Jumlah pengangguran terbuka}}{\text{Jumlah penduduk angkatan kerja}} \times 100\%$	Data Disnakertrans
	4.2 Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi	Pertumbuhan Ekonomi	Dinas Sosial	$R = \frac{PDB_{rt} - PDB_{rt-1}}{PDB_{rt-1}} \times 100\%$ <p>Keterangan R : Tingkat pertumbuhan ekonomi dalam satuan persentase (%) PDB_t : Produk Domestik Bruto (pendapatan nasional riil) pada</p>	Data Dinas Sosial

				tahun t PDBt-1 : Produk Domestik Bruto (pendapatan nasional riil) pada tahun sebelumnya	
--	--	--	--	---	--

NO.	SASARAN RPJMD	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SKPD PENANGGUNG JAWAB	KETERANGAN	SUMBER DATA
	4.2.1 Meningkatnya Ketahanan Pangan	Jumlah Cadangan pangan pemerintah	Dinas Ketahanan Pangan	Cadangan Pangan Pemerintah Kab/Kota (CPPK) "Y" = 80% x cadangan beras total provinsi "X" x rasio jumlah penduduk Kab/Kota "Y" terhadap jumlah penduduk Provinsi "X"	Dinas Ketahanan Pangan
	4.2.2 Meningkatnya Nilai Investasi PMA dan PMDN	Gini Ratio	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Rumus Formulasinya : (n-1)*10% Peningkatan Nilai Investasi dihitung berdasarkan Hasil Perhitungan Peningkatan Nilai Investasi sebesar 10% dari realisasi tahun sebelumnya (n-1).	Dinas Penanaman Modal Terpadu Satu Pintu
	4.2.3 Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah	Nilai PAD	Badan Pendapatan Daerah	TP PA Dt = PADt-(PADt-1)x100%PADt-1 Keterangan : TP PADt : TP PADt Tahun Berjalan PADt-1 : PAD Tahun Sebelumnya	Badan Pendapatan Daerah
5.	5.1 Terwujudnya Masyarakat yang Berakhlak Mulia	Persentase Penurunan Konflik Sosial	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	$\frac{\text{Konflik Yang Tertangani}}{100\%} \times \text{Konflik Yang Terjadi}$	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	5.1.1 Meningkatnya Nilai Keagamaan Masyarakat	Jumlah Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan di Masyarakat	Setda. Bagian Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Kegiatan Keagamaan Dalam Setahun	Setda. Bagian Kesejahteraan Rakyat
	5.1.2 Terwujudnya Budaya Sebagai Identitas Spesifik Daerah	Jumlah Lembaga Adat Yang Dibina	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Jumlah Lembaga Adat yang dibina dalam setahun	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

C. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja adalah lembar atau dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja yang merupakan amanat dari Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Perjanjian kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Tujuan khusus perjanjian kinerja adalah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur.

Tujuan penyusunan perjanjian kinerja adalah :

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur;
2. Menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi;
4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah;
5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, Pemerintah Kabupaten Lahat pada Tahun 2020 telah menetapkan Perjanjian Kinerja untuk mewujudkan target kinerja. Perjanjian kinerja tersebut dapat dilihat pada table II.2 berikut ini :

TABEL II.2
PERJANJIAN KINERJA KABUPATEN LAHAT TAHUN 2023

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	1.1 Meningkatkan Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih	Indeks Reformasi Birokrasi	B (70,05)
	1.1.1 Meningkatkan Pelayanan Prima bagi Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat	B (88,30)
2	1.1.2 Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Capaian Kinerja Pembangunan Yang Transparan dan Akuntabel	Opini BPK atas Laporan Keuangan	WTP
		Nilai SAKIP	B (75,10)
	2.1 Mengurangi Ketimpangan Antarwilayah	Indeks Aksesibilitas	0,33
	2.1.1 Meningkatkan Kapasitas Infrastruktur Wilayah	Persentase Panjang Jalan Kabupaten dalam Kondisi Mantap	79,34 Persen
	2.1.2 Terbangunnya Jaringan Infrastruktur Perhubungan Yang Terpadu dan Merata ke Seluruh Wilayah	Rasio Konektivitas Kabupaten	36 Terminal
	2.1.3 Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Jaringan Irigasi, Rawa serta Jaringan Irigasi Lainnya	Rasio Jaringan Irigasi	64 Rasio
	2.1.4 Tersedianya Sarana dan Prasarana Dasar Permukiman	Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni	85,71 Persen
	2.1.5 Terwujudnya Kesesuaian Pemanfaatan Ruang	Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang	95 Persen

	2.1.6	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	62,33
--	-------	--	----------------------------------	-------

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
3	3.1 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Indeks	70,02
	3.1.1 Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Umur Harapan Hidup	67,25 Tahun
	3.1.2 Meningkatnya Akses Dan Kualitas Pendidikan	Angka Harapan Lama Sekolah	12,65 Tahun
	3.1.3 Meningkatnya Prestasi Pemuda dan Olahraga	Jumlah Atlet Berprestasi	110 Orang
	3.4 Terbangunnya Perempuan, Anak dan Lansia yang Berkualitas dan Berdaya Saing dalam Pembangunan	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	72,6
4	4.1 Angka Kemiskinan	Persen	14,8 – 15,2 Persen
	4.1.1 Meningkatnya Kesejahteraan Sosial	Gini Ratio	0,301 Persen
	4.1.2 Meningkatnya Kesempatan Kerja	Tingkat Pengangguran	3,56 Persen
	4.2 Pertumbuhan Ekonomi	Persen	4,50 Persen
	4.2.1 Meningkatnya Ketahanan makanan	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah	30
	4.2.2 Meningkatnya Nilai Investasi PMA dan PMDN	Persentase Peningkatan PMA dan PMDN	6.5 Triliun

4.2.3	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah	Nilai PAD	145,15	Milyar
-------	--	-----------	--------	--------

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
5	5.1 Persentase Penurunan Konflik Sosial	Persen	100 Persen
	5.1.1 Meningkatnya Nilai Keagamaan Masyarakat	Jumlah Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan di Masyarakat	50
	5.1.2 Terwujudnya Budaya Sebagai Identitas Spesifik Daerah	Jumlah Lembaga Adat yang dibina	100

Sumber : Perjanjian Kinerja Tahun 2023 Pemerintah Kabupaten Lahat

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik. Akuntabilitas kinerja merupakan salah satu pondasi utama dalam menerapkan manajemen kinerja, dimana dengan dilakukannya pengukuran kinerja didapati jaminan peningkatan dalam pelayanan publik.

Capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Lahat Tahun 2023 berdasarkan pada hasil pengukuran, evaluasi dan analisis akuntabilitas kinerja, yang mencakup perjanjian kinerja tahun 2023, pengukuran pencapaian sasaran yang merupakan tingkat pencapaian target dari masing-masing indikator kinerja sebagaimana tercantum dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lahat Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lahat Tahun 2019 – 2023.

Dalam pengukuran capaian kinerja dimaksud dilakukan melalui proses pengumpulan data dan analisa data target dan realisasi masing-masing indikator sasaran. Pengumpulan data diperoleh melalui dua sumber yaitu data internal yang berasal dari pelaporan dari masing-masing SKPD di Kabupaten Lahat dan data eksternal yang berasal dari luar instansi/lintas sektoral. Selanjutnya data yang diperoleh dianalisis dan dituangkan dalam ikhtisar pencapaian sasaran yang ditetapkan dalam dokumen perjanjian kinerja dan dokumen perencanaan, yang selanjutnya dilakukan penghitungan capaian kinerja untuk pengukuran pencapaian sasaran.

Dengan berdasarkan pada ketentuan yang berlaku dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang

Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, pengukuran capaian kinerja menggunakan metode :

1. Semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik maka digunakan rumus :

$$\frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

2. Semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin rendah maka digunakan rumus :

$$\frac{(\text{Rencana} - (\text{Rencana} - \text{Rencana}))}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Berdasarkan pengukuran tersebut diperoleh tingkat capaian sasaran yang dikelompokkan dalam 5 kategori, pengelompokan tersebut untuk menggambarkan nilai peringkat kinerja untuk pengelompokan dikutip dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 sebagaimana tabel III.1 di bawah ini:

Tabel III.1
Skala Nilai Peringkat Kinerja

No.	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1.	91% ≤ 100%	Sangat tinggi
2.	76% ≤ 90%	Tinggi
3.	66% ≤ 75%	Sedang
4.	51% ≤ 65%	Rendah
5.	≤ 50%	Sangat Rendah

Sumber: *Permendagri Nomor 54 Tahun 2010*

A. Capaian Kinerja Pemerintah Kabupaten Lahat

Sesuai dengan Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Lahat Tahun 2023 dan RPJMD Tahun 2019-2023, setidaknya terdapat 22 (dua puluh dua) sasaran strategis dan 26 (dua puluh enam) indikator kinerja yang harus diwujudkan pada tahun 2023, untuk melihat realisasi dan capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Lahat Tahun 2023, berikut disampaikan tabel realisasi dan capaian kinerja tahun 2023 sebagai berikut :

TABEL III.2
TARGET, REALISASI DAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2023

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
1.	1.1	Meningkatnya Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih	Indeks Reformasi Birokrasi	B (70,05)	B (61,50)	87,79 %
	1.1.1	Meningkatnya Pelayanan Prima bagi Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat	Baik (88,30)	Baik (84,21)	95,36 %
	1.1.2	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Capaian Kinerja Pembangunan Yang Transparan dan Akuntabel	Nilai SAKIP	B (75,10)	B (66,01)	87,89 %
		Opini BPK Atas Laporan Keuangan	WTP	WTP	100 %	
2.	2.1	Mengurangi Ketimpangan Antar Wilayah	Indeks Aksesibilitas	0,33	0,25	75,75 %
	2.1.1	Meningkatnya Kapasitas Infrastruktur Wilayah	Persentase Panjang Jalan Kabupaten dalam Kondisi Mantap	79,34%	87,78	110,63%

	2.1.2	Terbangunnya Jaringan Infrastruktur Perhubungan Yang Terpadu dan Merata Keseluruh Wilayah	Rasio Konektivitas Kabupaten	36	25,6	71,11 %
	2.1.3	Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Jaringan Irigasi, Rawa serta Jaringan Irigasi Lainnya	Rasio Jaringan Irigasi	64	72,62	113,46%

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
	2.1.4	Tersedianya Sarana dan Prasarana Dasar Permukiman	Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni	85,71	86,18	100,54%
	2.1.5	Terwujudnya Kesesuaian Pemanfaatan Ruang	Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang	95	98,25	103,42%
	2.1.6	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	62,33	68,46	109,83%
3.	3.1	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Indeks	70,02	72,15	103,04%
	3.1.1	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Umur Harapan Hidup	67,25	73,36	109,08%
	3.1.2	Meningkatnya Akses dan Kualitas Pendidikan	Angka Harapan Lama Sekolah	12,65	12,44	98,33%
	3.1.3	Meningkatnya Prestasi Pemuda dan Olahraga	Jumlah Atlet Berprestasi	110 Orang	477 Orang	433,63 %
	3.1.4	Terbangunnya Perempuan, Anak dan Lansia yang Berkualitas dan Berdaya Saing dalam Pembangunan	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	72,6	67,90	93,52 %
4.	4.1	Angka Kemiskinan	Persen	14,8 – 15,2	15,0	100%
	4.1.1	Meningkatnya Kesejahteraan Sosial	Gini Ratio	0,301	0,325	107,67%

	4.1.2	Meningkatnya Kesempatan Kerja	Tingkat Pengangguran	3,56	3,41	97,43%
--	-------	-------------------------------------	-------------------------	------	------	--------

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
	4.2	Pertumbuhan Ekonomi	Pertumbuhan Ekonomi	4,50	6,73	149,55%
	4.2.1	Meningkatnya Ketahanan Makanan	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah	30	14,6	48,66%
	4.2.2	Meningkatnya Nilai Investasi PMA dan PMDN	Persentase Peningkatan PMA dan PMDN	6,5	8.8	135 %
	4.2.3	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah	Nilai PAD	145,15 Milyar	169,70 Milyar	116,91%
5.	5.1	Persentase Penurunan Konflik Sosial	Persen	100%	100%	100%
	5.1.1	Meningkatnya Nilai Keagamaan Masyarakat	Jumlah Penyelenggara Kegiatan Keagamaan di Masyarakat	50	60	120%
	5.2	Terwujudnya Budaya sebagai Identitas Spesifik Daerah	Jumlah Lembaga Adat yang dibina	100	39	39%

Sumber : Hasil Pengolahan Data dari OPD terkait

Berikut ini akan disampaikan analisis capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Lahat Tahun 2023 yaitu sebagai berikut :

1. Tujuan Pertama

1.1. Capaian Kinerja Tujuan Pertama “Meningkatnya Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (*good government*) dan Pemerintahan yang Bersih (*clean government*)”

Untuk mewujudkan Tujuan Pertama Pemerintah Kabupaten Lahat yaitu “Meningkatnya Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (*good government*) dan Pemerintahan yang Bersih (*clean government*)’ diukur dengan indikator kinerja “**Indeks Reformasi Birokrasi**” dan memiliki 2 (dua) sasaran strategis dengan indikator kinerja masing-masing yaitu :

- a. Sasaran 1.1.1 Meningkatkan Pelayanan Prima Bagi Masyarakat indikator Kinerjanya Indeks Kepuasan Masyarakat;
- b. Sasaran 1.1.2 Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Capaian Kinerja Pembangunan yang Transparan dan Akuntabel indikator Kinerjanya Opini BPK atas Laporan Keuangan dan Nilai SAKIP.

a.1.1. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

Untuk mengukur capaian kinerja tujuan 1.1. yaitu “**Meningkatnya Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (*good government*) dan Pemerintahan yang Bersih (*clean goverment*)**”, dapat dilihat dari perbandingan antara target dan realisasi tahun 2023 ini sebagaimana tabel dibawah ini:

Tabel III.2.1.1
Perbandingan Antara Target dan
Realisasi Kinerja Tahun 2023
Untuk Tujuan Meningkatkan Perwujudan
Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik
dan Pemerintahan Yang Bersih

No.	Indikator Kinerja	Tahun 2023		
		Target	Realisasi	% Capaian
1.	Indeks Reformasi Birokrasi	B (70,05)	B (61,50)	87,79 %
2.	Indeks Kepuasan Masyarakat	Sangat Baik (88,30)	Sangat Baik (87,91)	99,10 %

3.	Nilai SAKIP	B (75,10)	B (66,01)	87,89 %
	Rata-rata Capaian	91,59 %		

Sumber Data : Kemenpan dan RB RI, OPD Terkait

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja tujuan Meningkatnya Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (*good government*) dan Pemerintahan yang Bersih (*clean government*) dengan indikator kinerja Indeks Reformasi Birokrasi, berdasarkan surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/594/RB.06/2024 Tanggal 1 Februari 2024 hal Hasil Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tahun 2023 Kabupaten Lahat mendapatkan nilai 61,50 dengan katagori “B”. Capaian tersebut belum sesuai dengan yang ditargetkan untuk tahun 2023 yaitu 70,05 atau dengan kategori B.

Untuk sasaran 1.1.1. yaitu meningkatnya pelayanan prima bagi masyarakat, dengan 1 (satu) indikator sebagai tolok ukurnya yaitu Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM), tergambar bahwa dari hasil Survei Kepuasan Masyarakat yang dilaksanakan oleh 3 OPD di Kabupaten Lahat dengan rata – rata nilai IKM sebesar 87,51 atau 99,10 % dari target yang telah ditetapkan yaitu 88,30. Sesuai skala nilai peringkat kinerja sebagaimana tabel III.1 Skala Nilai Perangkat Kinerja, maka capaian kinerja sasaran 1.1.1 termasuk kategori **sangat tinggi**.

Untuk memenuhi indikator **Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)** dilakukan survei indeks kepuasan masyarakat. Hasil survei kepuasan masyarakat ini digunakan untuk melihat tingkat kepuasan masyarakat atas pelayanan yang mereka terima serta memberikan kesempatan kepada

masyarakat untuk menilai secara obyektif dan periodik terhadap perkembangan kinerja unit pelayanan publik dan tingkat kualitas kinerja yang diberikan oleh unit pelayanan publik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lahat. Terhadap indikator indeks kepuasan masyarakat (IKM) tersebut dilakukan penentuan nilai kinerja unit pelayanan, dengan menggunakan Nilai Persepsi, Nilai Interval, Nilai Interval Konversi Mutu Pelayanan dan Kinerja Unit Pelayanan, sebagaimana table berikut :

NILAI PERSEPSI	NILAI INTERVAL (NI)	NILAI INTERVAL KONVERSI (NIK)	MUTU PELAYANAN	KINERJA UNIT PELAYANAN
1	1,00 - 2,5996	25,00-64,99	D	Tidak Baik
2	2,60 - 3,064	65,00 - 76,60	C	Kurang Baik
3	3,0644 - 3,532	76,61 - 88,30	B	Baik
4	3,5324 - 4,00	88,31 – 100	A	Sangat Baik

Survey kepuasan masyarakat tersebut berpedoman kepada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Untuk tahun 2023 Pemerintah Kabupaten Lahat melakukan survei kepuasan masyarakat pada 3 (tiga) perangkat daerah unit pelayanan publik, hasil survei tersebut dapat dilihat pada tabelberikut :

Tabel III.2.1.2.
Hasil Survei Kepuasan Masyarakat
Atas Pelayanan Publik Pada 3 (tiga) OPD
Penyelenggara Pelayanan Publik Secara Langsung
Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lahat Tahun 2023

No.	Instansi	Nilai IKM	Predikat
1.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	91,78	Sangat Baik
2.	Dinas Kesehatan (RSUD)	88,35	Sangat Baik
3.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	82,40	Baik
	IKM Rata-rata	87,51	Sangat Baik

Sumber : Hasil Pengolahan Data OPD Pelayanan

Berdasarkan hasil pengukuran sasaran 1.1.2 yaitu Meningkatnya akuntabilitas dan kinerja pemerintah daerah, dari 2 (dua) indikator kinerja sebagai tolak ukurnya tergambar bahwa capaian kinerjanya dapat dikategorikan sangat baik, dengan rata-rata capaian 100%.

Pencapaian terhadap sasaran ini diukur dan dinilai juga dari indikator Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) dan Kategori Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah, Opini BPK Kabupaten Lahat sejak 9 (sembilan) tahun lalu dan sampai Tahun 2023 telah mencapai target yaitu mencapai target yaitu mencapai Opini “**WTP**” atau dalam kategori **Wajar Tanpa Pengecualian**.

Untuk capaian indikator kategori atau nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah tahun 2023, berdasarkan hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Lahat dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dengan Pencapaian **Kategori Baik** yaitu dengan nilai **66,01**, sedangkan yang ditargetkan pada tahun 2023 adalah kategori B dengan nilai **75,10**. Salah satu alat untuk mengukur keberhasilan tingkat Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia setiap tahun melaksanakan evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (KIP) (Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah). Predikat yang diterima pada tahun 2023 atas Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Lahat Tahun 2023, berdasarkan surat dari Kementerian PAN dan RB RI Nomor : B/233/AA.05/2023, Perihal Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2023.

a.1.2. Perbandingan antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun Sebelumnya

Selanjutnya perbandingan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2022 dengan tahun 2023 sebagaimana tabel berikut :

**Tabel III.2.1.3.
Perbandingan Antara Realisasi Kinerja
Tahun 2023 dengan Tahun Sebelumnya
Untuk Tujuan Meningkatnya Perwujudan Tata Kelola
Pemerintahan yang Baik dan Pemerintahan yang Bersih**

No.	Indikator	Tahun 2022			Tahun 2023		
		Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%

	Kinerja			Capaian			Capaian
1.	Indeks Reformasi Birokrasi	B (69,25)	CC (51,43)	74,27%	B (70,05)	B (61,50)	87,79 %
2.	Indeks Kepuasan Masyarakat	B (88,30)	Baik (84,003)	96,44%	Sangat Baik (88,30)	Sangat Baik (87,91)	99,10 %
3.	Nilai SAKIP	B (72,50)	B (67,03)	92,45%	B (75,10)	B (66,01)	87,89 %
	Rata-rata Capaian	87,72 %				91,59 %	

Sumber Data : Kemenpan dan RB RI, BPKP

Dari hasil tabel III.2.1.3., capaian tujuan 1.1. yaitu Meningkatnya Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Pemerintahan yang Bersih, untuk tahun 2023 dengan dengan rata-rata realisasi capaian 91,59 %, jika dibandingkan dengan rata-rata capaian tahun 2022 dengan realisasi 87,72 % mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Capaian rata-rata tahun 2023 adalah 91,59 % mencapai target kinerja dan sudah termasuk dalam kategori berkinerja “**Tinggi**”. Indikator tersebut telah dilaksanakan secara maksimal sesuai target yang telah ditetapkan.

a.1.3. Perbandingan antara realisasi kinerja tahun 2023 dengan target akhir RPJMD.

Tahun 2023 ini merupakan tahun terakhir RPJMD Kabupaten Lahat Tahun 2019-2023, untuk memperoleh gambaran sejauh mana pencapaian target sampai dengan Tahun 2023 ini, maka di bawah akan disajikan data perbandingan capaian kinerja sampai dengan Tahun 2023 dengan target akhir yang ditetapkan dalam RPJMD.

**Tabel III. 2.1.4.
Realisasi Kinerja Dibanding Target Jangka Menengah**

Untuk Tujuan Meningkatnya Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Pemerintahan yang Bersih

No.	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2023	Target Akhir RPJMD (2023)
1.	Indeks Reformasi Birokrasi	B (61,50)	B (70,05)
2.	Indeks Kepuasan Masyarakat	Sangat Baik (87,91)	Sangat Baik (88,30)
3.	Nilai SAKIP	B (66,01)	B (75,10)

Untuk realisasi kinerja tujuan 1.1. Meningkatnya Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Pemerintahan yang Bersih sampai dengan tahun 2023 (akhir RPJMD) apabila dibandingkan dengan target jangka menengah yang telah ditetapkan dalam RPJMD maka rata-rata pencapaian target tujuan 1.1. belum tercapai, meski belum mencapai target akhir jangka menengah akan tetapi capaian untuk tujuan 1.1. pada tahun 2023 ini sudah termasuk dalam kategori berkinerja tinggi.

a.1.4. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

1.1. Meningkatnya Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Pemerintahan yang Bersih

Tujuan “Meningkatnya Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Pemerintahan yang Bersih diukur dengan indikator kinerja “Indeks Reformasi Birokrasi”, pada tahun 2023 ini ditargetkan mendapat kategori “Baik” atau dengan nilai 70,05 Akan tetapi capaian kinerja pada tahun 2023 baru mencapai

87,79 % yaitu dengan realisasi nilai baru mencapai 61,50 atau dengan kategori “B”. Belum tercapainya target kinerja “Indeks Reformasi Birokrasi” tersebut disebabkan beberapa hal yang belum dipenuhi oleh Pemerintah Kabupaten Lahat dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi. Hal tersebut sejalan hasil evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi tahun 2023 dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi yaitu :

- a. Penetapan Kegiatan Utama Mandatory belum sepenuhnya sesuai dengan mandat Permenpanrb nomor 3 Tahun 2023 - Rencana Aksi belum sepenuhnya relevan untuk mencapai target Sasaran Kegiatan Utama.
- b. Indikator tidak berorientasi pada hasil
- c. Target tidak SMART
- d. Pengendalian yang ada belum diarahkan untuk memitigasi risiko/pencapaian tujuan
- e. Kebijakan MR belum ada/ memadai
- f. Pengendalian korupsi belum didukung sumber daya yang memadai.
- g. Penyelenggaraan statistik sektoral di Pemerintah Kabupaten Lahat masih berada pada predikat Kurang.
- h. Penerapan Aspek Pengorganisasian Statistik terkait Kolaborasi Penyelenggaraan Kegiatan Statistik dan Kolaborasi dengan Pembina Data Statistik telah dilaksanakan oleh tim yang dibentuk secara formal sesuai Peraturan Bupati Lahat Nomor 16 Tahun 2020 tentang Satu Data Lahat.
- i. Walidata telah terlibat dalam Forum Satu Data Indonesia sesuai dengan rencana aksi Forum Satu Data Indonesia, namun belum semua rencana aksi

yang ditetapkan/ disepakati telah dilaksanakan. Selain itu penyelenggaraan pelaksanaan tugas sebagai walidata belum dilakukan seluruhnya.

- j. Rencana Aksi dengan Indikator Keberhasilan RB Tematik Instansi Pemerintah belum mampu menjawab sasaran keberhasilan yang ditentukan.

1.1.1. Meningkatnya Pelayanan Prima Bagi Masyarakat

Sasaran Kinerja “Meningkatnya Pelayanan Prima Bagi Masyarakat” diukur dengan indikator kinerja “Indeks Kepuasan Masyarakat”. Faktor-faktor yang mempengaruhi meningkatnya pelayanan prima bagi masyarakat, antara lain :

1. Adanya komitmen untuk terus menerus berupaya meningkatkan kinerja dan kualitas pelayanan publik sebagaimana telah menjadi orientasi dalam reformasi birokrasi yang tengah digulirkan;
2. Kompetensi dan kualitas sumber daya manusia penyelenggaraan pelayanan publik yang memadai, baik pada tataran kebijakan, administratif maupun teknis pelayanan;
3. Dukungan ketersediaan sarana dan prasarana pelayanan publik yang cukup memadai;
4. Partisipasi dan kepedulian masyarakat khususnya dalam memberikan respon dan masukan terhadap penyelenggaraan pelayanan publik.

Namun demikian dalam pencapaian tersebut juga masih ditemui hambatan/masalah, hambatan/masalah tersebut telah diupayakan untuk diatasi dengan strategi pemecahan hambatan/masalah sebagaimana penjelasan dibawah ini :

1. Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, secara umum kualitas pelayanan telah dinilai sangat baik oleh pengguna layanannya. Hal ini terlihat dari Indeks Kepuasan Masyarakat yang dicapai yaitu 91,78 atau dengan kategori Sangat Baik. Oleh karena itu perlu adanya upaya untuk mempertahankan kualitas pelayanan yang sudah ada, dengan melakukan upaya peningkatan kualitas pelayanan secara konsisten terutama pada waktu pelayanan dalam menerbitkan izin sesuai dengan standart pelayanan. Selain itu masih ada beberapa hambatan yang menjadi kendala dalam peningkatan kualitas pelayanan, antara lain :

a. Persyaratan pelayanan perizinan

Pada saat mengurus perizinan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, masih banyak persyaratan yang harus disiapkan/dilengkapi oleh masyarakat yang akan membuat izin, masyarakat tak jarang mengalami kesulitan dalam melengkapi prasyarat tersebut, apalagi masyarakat yang bertempat tinggal di desa yang cukup jauh jaraknya.

b. Kecepatan Pelayanan

Dengan persyaratan yang cukup banyak dan jarak tempuh yang cukup jauh menyebabkan kecepatan pelayanan membuat izin membutuhkan waktu yang cukup lama, ditambah lagi dengan sistem informasi di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu masih belum memadai.

2. Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Lahat, yaitu layanan pada Rumah Sakit Umum Daerah secara umum kualitas pelayanan telah dinilai sangat baik

oleh pengguna layanannya. Hal ini terlihat dari Indeks Kepuasan Masyarakat yang dicapai yaitu 88,35 atau dengan kategori Sangat Baik. Oleh karena itu perlu adanya upaya untuk mempertahankan kualitas pelayanan yang sudah ada hambatan/masalah yang dihadapi pada prinsipnya adalah dari faktor prosedur pelayanan, persyaratan pelayanan, kewajaran biaya pelayanan dan kejelasan petugas pelayanan. Dari faktor tersebut pelayanan RSUD sudah bernilai baik. Namun untuk terus dapat meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Lahat maka perlu dilakukan perbaikan atau peningkatan kualitas pelayanan terhadap tingkat kepuasan pasien, sehingga terciptanya pelayanan prima. Untuk mengatasi hal-hal tersebut Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Lahat akan melakukan hal-hal sebagai berikut :

- a. Perlu ditingkatkan profesionalisme sumber daya manusia yang berakhlak, sehat, cerdas, terampil dan kepribadian luhur agar dalam memberikan pelayanan kesehatan dapat menjalankan tugasnya dengan baik;
- b. Sarana dan prasarana fasilitas RSUD perlu ditingkatkan, terutama kebersihan dan fasilitas kamar mandi;
- c. Prosedur pelayanan kesehatan yang mudah dipahami terutama dalam hal keterbukaan informasi.

3. Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Hambatan/masalah yang dihadapi pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lahat pada prinsipnya adalah dari fasilitas pelayanan yang kurang memadai, perangkat komputer sudah banyak rusak. Sumber daya manusia pelaksana pelayanan, khusus operator komputer juga

masih sangat kurang. Seirama dengan kekurangan tersebut diatas, dukungan dana untuk peningkatan pelayanan juga kurang. Namun untuk terus dapat meningkatkan kualitas pelayanan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil, perlu dilakukan perbaikan atau peningkatan kualitas di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, sehingga terciptanya pelayanan prima. Untuk mengatasi hal-hal tersebut Lahat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil akan melakukan hal-hal sebagai berikut :

1. Mengusulkan penambahan tenaga operator computer;
2. Mengusulkan peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui bimbingan teknis bidang pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil;
3. Mengharapkan adanya penambahan jumlah unit computer yang mendukung akses pelayanan prima;
4. Mengharapkan perbaikan dan perluasan ruang pelayanan;
5. Mengharapkan pengadaan seperangkat kendaraan mobile untuk mendukung pelayanan jemput bola ke daerah-daerah yang jauh.

1.1.2. Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Capaian Kinerja Pembangunan yang Transparan dan Akuntabel

Dari hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Lahat, dengan capaian 87,89 % yaitu kategori B, terlihat bahwa ada sedikit penurunan yaitu dari predikat B dengan nilai 67,03 pada evaluasi tahun 2022 menjadi predikat B dengan nilai 66,01 pada evaluasi tahun 2023. Oleh karena itu dalam rangka lebih mengefektifkan penerapan-penerapan budaya kinerja, direkomendasikan beberapa hal sebagai berikut :

1. Melakukan reviu terhadap dokumen perencanaan agar sasaran dan indikator kinerja yang digunakan lebih berorientasi hasil dan memenuhi

kriteria SMART {specific, measurable, achievable, relevant dan timebound) dan cukup baik level pemerintah daerah maupun perangkat daerah. Selain itu, Pemerintah Kabupaten Lahat diharapkan dapat mereviu kesesuaian level pengampu kinerja yang ada;

2. Memastikan rumusan kinerja pada tingkat perangkat daerah berangkat dari isu strategis dan alasan utama eksistensi perangkat daerah tersebut;
3. Menyempurnakan proses penjabaran kinerja dengan memperbaiki kerangka logis yang mendasarinya sehingga dapat menghasilkan alternatif solusi yang mampu memecahkan masalah yang di Pemerintah Kabupaten Lahat;
4. Mendorong komitmen pimpinan dari seluruh perangkat daerah untuk memanfaatkan aplikasi sebagai sarana monitoring dan evaluasi secara efektif dengan secara aktif dan update menyampaikan pengukuran capaian kinerja, dan pimpinan memberikan feedback perbaikan sebagai bentuk controlling terhadap pencapaian kinerja yang dimiliki;
5. Menjadikan hasil dari pengukuran kinerja masing-masing perangkat daerah dijadikan dasar dalam pemberian reward and punishment, termasuk dalam pemberian tunjangan kinerja atau TPP;
6. Meningkatkan kualitas laporan kinerja dengan mengeksplorasi dan menganalisis secara mendalam faktor pendukung dan penghambat pencapaian kinerja;
7. Memastikan keandalan dan ketepatan data tingkat efisiensi penggunaan sumber daya yang disajikan. Selain itu, Pemerintah Kabupaten Lahat diharapkan meningkatkan kualitas laporan kinerja pada tingkat pemerintah daerah dan perangkat daerah untuk dapat menyajikan informasi secara detail per pencapaian kinerja terkait dengan analisis efisiensi penggunaan sumber daya yang dimiliki dan analisa upaya-upaya perbaikan kinerja ke depan sehingga laporan kinerja dapat dimanfaatkan sebagai dasar pertimbangan perencanaan kinerja kedepan;
8. Meningkatkan kualitas laporan kinerja dengan melakukan analisis yang lebih mendalam untuk dapat memberikan informasi deskriptif program/kegiatan yang menunjang keberhasilan atau mengakibatkan

kegagalan dalam pencapaian kinerja dan melakukan benchmark dari kabupaten, provinsi, dan apabila memungkinkan dengan nasional untuk kinerja yang sifatnya strategis serta menjadikan laporan akuntabilitas kinerja dengan informasi yang lengkap sebagai standar atau pedoman untuk dapat diimplementasikan ke seluruh perangkat daerah;

9. Menyusun pedoman pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja internal sesuai dengan Peraturan Menteri PANRB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah;
10. Inspektorat untuk memastikan bahwa temuan dan rekomendasi yang diberikan saat evaluasi akuntabilitas kinerja internal menggambarkan hal yang menjadi kekurangan dan memberikan solusi yang efektif yang perlu dilakukan guna meningkatkan kualitas implementasikan SAKIP di setiap perangkat daerah;
11. Mendorong pelaksanaan monitoring secara berkala rekomendasi yang diberikan kepada perangkat daerah melalui LHE internal guna memastikan bahwa tindak lanjut yang dilakukan dalam menjawab rekomendasi tersebut telah sesuai dengan yang di inginkan oleh evaluator internal.

b.5 Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Sasaran tersebut dicapai melalui program-program sebagai berikut :

1. Sosialisasi Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Asistensi penyesuaian dokumen RPJMD dengan dokumen Renstra SKPD;
3. Asistensi penetapan target capaian sasaran, program dan kegiatan yang berorientasi hasil;

4. Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah;
5. Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan kepala daerah;
6. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.

2. Tujuan Kedua :

2.1. Capaian Kinerja Tujuan Kedua “Mengurangi Ketimpangan Antar Wilayah”

Tujuan Kedua Pemerintah Kabupaten Lahat adalah Mengurangi Ketimpangan Antar Wilayah diukur dengan indikator kinerja “**Indeks Aksesibilitas**”. Untuk mewujudkan tujuan tersebut ditetapkan 6 (enam) sasaran strategis dengan indikator kinerja masing-masing sebagai berikut:

- a. Sasaran 2.1. Meningkatnya Kapasitas Infrastruktur Wilayah dengan indikator kinerja Persentase Panjang Jalan Dalam Kondisi mantap;
- b. Sasaran 2.2. Terbangunnya Jaringan Infra Struktur Perhubungan Yang Terpadu dan Merata ke seluruh wilayah dengan indikator kinerja Rasio Konektivitas Kabupaten;
- c. Sasaran 2.3. Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Jaringan Irigasi, Rawa serta Jaringan Irigasi lainnya dengan indikator kinerja Rasio Jaringan Irigasi;
- d. Sasaran 2.4. Tersedianya Sarana dan Prasarana Dasar Pemukiman dengan indikator kinerja Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni;
- e. Sasaran 2.5. Terwujudnya Kesesuaian Pemanfaatan Ruang dengan indikator kinerja Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang;

- f. Sasaran 2.6. Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup dengan indikator kinerja Indeks Kualitas Lingkungan Hidup.

a.2.1. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

Untuk mengukur capaian kinerja tujuan 2.1. “**Mengurangi Ketimpangan antar Wilayah**” dapat dilihat dari perbandingan antara target dan realisasi kinerja, sebagaimana tabel dibawah ini :

Tabel III. 2.2.1.
Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023
Untuk Tujuan Mengurangi Ketimpangan Antar Wilayah

No.	Indikator Kinerja	Tahun 2023		
		Target	Realisasi	% Capaian
1.	Indeks Aksesibilitas	0,33	0,25	75,75 %
2.	Persentase Panjang Jalan Kabupaten dalam Kondisi Mantap	79,34	87,78	110,63%
3.	Rasio Konektivitas Kabupaten	36	25,6	71,11 %
4.	Rasio Jaringan Irigasi	64	72,62	113,46%
5.	Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni	85,71	86,18	100,54%
6.	Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang	95	98,25	103,42%
7.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	62,33	68,46	109,83 %
Rata-rata Capaian				97,82 %

Sumber Data : OPD terkait

Untuk tujuan “Mengurangi Ketimpangan antar Wilayah” realisasi kinerja sampai dengan tahun 2023 maka rata – rata pencapaian target kinerjanya masih di bawah 100%, yaitu baru mencapai 97,82%. Tujuan 2.1 “Meningkatnya Kapasitas Insfrastruktur Wilayah” belum dapat tercapai sesuai target. Hal ini terlihat dari indikator kerja kinerja pada sasaran indikator kinerja Indeks Aksesibilitas, pada tahun 2023 dari target 0,32 realisasinya baru 0,25 atau capaiannya baru 75,75%, untuk indikator Kerja Rasio Konektivitas Kabupaten pada tahun 2023 dari target 36 realisasinya baru 25,6 atau capaian 71,11 %, sedangkan untuk indikator Persentase Panjang Jalan Kabupaten dalam Kondisi Mantap 110,63% dari target kinerja, indikator Rasio Jaringan Irigasi 113,46% dari target kinerja, indikator Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni 100,54% dari target kinerja, indikator Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang 103,42% dari target kinerja, dan untuk indikator Indeks Kualitas Lingkungan Hidup 109,83 % dari target kinerja semuanya telah mencapai target kinerja diatas 100%.

a.2.2. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun Sebelumnya

Jika dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2022, maka untuk capaian kinerja untuk tujuan “Mengurangi Ketimpangan Antar Wilayah”, mengalami peningkatan yakni dari 94,66 % di tahun 2022 menjadi 97,82 di tahun 2023. Adapun perbandingan realisasi dan prosentase capaian untuk masing-masing indikator sebagaimana tersaji dalam tabel dibawah ini :

Tabel III. 2.2.2.

Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun Sebelumnya Untuk Tujuan Mengurangi Ketimpangan Antar Wilayah

No.	Indikator Kinerja	Tahun 2022			Tahun 2023		
		Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian
1.	Indeks Aksesibilitas	0,32	0,25	78,125 %	0,33	0,25	75,75 %
2.	Persentase Panjang Jalan Kabupaten dalam Kondisi Mantap	74,49%	60,60 %	81,35 %	79,34	87,78	110,63%
3.	Rasio Konektivitas	36	25,6	71,11 %	36	25,6	71,11 %
4.	Rasio Jaringan Irigasi	64 %	73,95 %	117,4 %	64	72,62	113,46%
5.	Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni	85,46 %	85,087 %	99,56 %	85,71	86,18	100,54%
6.	Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang	94 %	99,04 %	105,36 %	95	98,25	103,42%
7.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	62,29	68,34	109,71 %	62,33	68,46	109,83 %
Rata-rata Capaian		94,66 %			97,82 %		

Sumber : Data dari OPD terkait

a.2.3. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Tahun 2022 Dengan target akhir RPJMD

Untuk memperoleh gambaran sejauh mana pencapaian target sampai dengan tahun 2023 yang merupakan akhir dari RPJMD 2019 – 2023 ini, maka di bawah akan disajikan data perbandingan capaian kinerja sampai dengan Tahun 2023 dengan target akhir yang ditetapkan dalam RPJMD, sebagaimana tabel berikut :

Tabel III. 2.2.3.
Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Tahun 2023
dengan Target Akhir RPJMD
Untuk Tujuan Mengurangi Ketimpangan Antar Wilayah

No.	Indikator Kinerja	Realisasi 2023	Target RPJMD
1.	Indeks Aksesibilitas	0,25	0,33
2.	Persentase Panjang Jalan Kabupaten dalam Kondisi Mantap	87,78%	79,34 %
3.	Rasio Konektivitas	25,6	36
4.	Rasio Jaringan Irigasi	72,62%	64 %
5.	Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni	86,18%	85,71 %
6.	Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang	98,25%	95 %
7.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	68,46%	68,33 %

Sumber : Data dari OPD terkait

Untuk realisasi kinerja sampai dengan tahun 2023 yang merupakan akhir dari RPJMD 2019 - 2023 apabila dibandingkan dengan target jangka

menengah yang telah ditetapkan dalam RPJMD maka rata-rata pencapaian target tujuan 2.1. “Meningkatnya Kapasitas Infrastruktur Wilayah” tercapai sesuai target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

a.2.4. Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Untuk tujuan kedua **Meningkatkan Kapasitas Infrastruktur dan Sarana/Prasarana** dengan sasaran **Mengurangi Ketimpangan antar Wilayah** indikator kinerja yaitu Indeks Aksesibilitas perlu untuk terus ditingkatkan capaiannya sehingga target dalam RPJMD yang diharapkan bisa tercapai, indikator tersebut yang perlu mendapat perhatian Indeks Aksesibilitas. Jika ditinjau dari pengertiannya Aksesibilitas adalah tingkat kemudahan untuk mencapai suatu lokasi tujuan dan yang menjadi ukuran adalah jarak, waktu tempuh dan kelengkapan dan kualitas dari fasilitas yang tersedia. Metode yang dipakai untuk menentukan aksesibilitas adalah cara survey langsung ke lapangan dan juga melalui perhitungan “Nilai Aksesibilitas” dan Indeks Aksesibilitas. Untuk Kabupaten Lahat menggunakan Indeks Aksesibilitas dan merupakan indikator yang baru ada pada Indikator Kinerja Utama Kabupaten Lahat, sehingga baru tahun 2023 ini Dinas Perhubungan selaku perangkat daerah penanggungjawab dapat menghitung Indeks Aksesibilitas Kabupaten Lahat yaitu 0,25 atau mencapai 75,75 % dari target akhir RPJMD tahun 2023 yaitu 0,33.

Untuk mencapai sasaran Terbangunnya Jaringan Infrastruktur Perhubungan yang Terpadu dan Merata ke Seluruh Wilayah diukur dengan

indikator kinerja adanya Jumlah Terminal Yang Memiliki Sarana dan Fasilitas yang Memadai, dengan target 2 Terminal pada tahun 2023 secara fisik target tersebut belum tercapai karena baru terdapat yaitu terdapat 1 (satu) terminal yang mempunyai sarana dan fasilitas yang memadai yaitu Terminal Tipe C Lembayung, sedangkan Terminal Tipe C Muara Siban sudah tidak layak lagi. Namun demikian kondisi kedua terminal tersebut masih perlu banyak perbaikan dan penambahan kelengkapan fasilitas agar dapat dikategorikan sebagai terminal yang memiliki sarana dan fasilitas yang memadai. Pada tahun 2023 ini indikator tersebut di atas tidak menjadi tolak ukur sehingga diganti dengan Rasio Konektivitas Kabupaten yang diukur dengan rumus :

Rasio Konektivitas Kabupaten = (IK1 x bobot angkutan jalan) + (IK2 x bobot angkutan sungai danau dan penyeberangan)

Ket :

- IK1 (Angkutan jalan) = (Jumlah trayek yang dilayani pada Kabupaten x bobot trayek) dibagi (Jumlah Kebutuhan trayek pada Kota/Kabupaten tersebut)
- IK2 (Angkutan sungai, danau dan penyeberangan) = (Jumlah lintas Penyeberangan yang beroperasi pada Kabupaten x bobot lintas) dibagi (Jumlah Kebutuhan lintas penyeberangan pada Kabupaten/Kota tersebut)

Selanjutnya berkaitan dengan Indikator kinerja “Indeks Kualitas Lingkungan Hidup”, untuk penghitungan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup, berdasarkan rumus yang telah ditentukan dalam lampiran Peraturan Bupati Lahat Nomor 33 Tahun

2019 tentang Penetapan Indikator Kinerja Pemerintah Kabupaten Lahat, Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten dapat dihitung dengan rumus :

$$IKLH \text{ Kabupaten} = (37,6\% \times IKA) + (40,5 \times IKU) + (21,9\% \times IKTL)$$

Dari rumus tersebut artinya untuk dapat mengetahui Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH), harus diketahui terlebih dahulu Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU) dan dan Indeks Kualitas Tutupan Lahat (IKTL). Untuk tahun 2023 ini berdasarkan data dari perangkat daerah penanggungjawab yaitu Dinas Lingkungan Hidup, Indeks Kualitas Air (IKA) adalah 62,17 dan Indeks Kualitas Udara (IKU) adalah 87,88, sedangkan untuk Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) adalah 43,36. Sehingga realisasi Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten pada tahun 2023 ini adalah 68,46. Realisasi IKLH Kabupaten Tahun 2023 sebesar 68,46 atau lebih tinggi dari target yang ditetapkan yaitu sebesar 62,33, nilai tersebut disebabkan beberapa hal sebagai berikut :

- Validasi data sudah dilakukan oleh pihak Provinsi dan KLHK. DLH Kabupaten Lahat mendapatkan Nilai IKLH pada Web Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Dengan mengambil sampel dari Kabupaten Lahat, Provinsi Sum-Sel dan KLHK sebagai berikut : IKA 21 titik sungai yaitu = DLHP 7 titik 2 kali pemantauan, DLH Kabupaten} 14 titik 2 kali pemantauan = 42 data IKU 8 titik pantau yaitu = (dilokasi perkantoran, perumahan, industri dan} transportasi) yaitu = KLHK 4 titik pantau 2 kali pemantauan, DLHP 4 titik pantau 1 kali pemantauan, DLH Kabupaten Lahat 16 titik pantau 1 kali pemantauan. IKTL yaitu = sumber data dari KLHK 42 Data Pepohonan lainnya} yang relevan.
- Realisasi IKU lebih tinggi dari target juga disebabkan oleh terjadinya perubahan rumus perhitungan IKLH Kabupaten/Kota Tahun 2020 -2024 (sesuai Surat Ditjen

Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan KLHK Nomor: S.318/PPKL/REN.O/12/2020, tanggal 4 Desember 2020) dari rumus IKLH Kabupaten = $(30\% \times IKA) + (30\% \times IKU) + (40\% \times IKTL)$ menjadi $(37,6\% \times IKA) + (40,5\% \times IKU) + (21,9\% \times IKTL)$. Perubahan kenaikan persentase IKA dan IKU serta penurunan persentase IKTL dalam rumus baru, menyebabkan kenaikan hasil perhitungan IKLH Kabupaten.

- Realisasi IKK Outcome untuk Persentase Jumlah Sampah yang Tertangani (Program dan Kegiatan Pengelolaan Persampahan) yaitu 33,32% atau 98,00% dari 34% yang ditargetkan di tahun 2023 (kategori Berhasil).

3. Tujuan Ketiga

3.1. Capaian Kinerja Tujuan Ketiga “Meningkatkan Kualitas Manusia dengan Seutuhnya”

Untuk Mewujudkan Tujuan Ketiga Pemerintah Kabupaten Lahat yaitu Meningkatnya Kualitas Manusia dengan Seutuhnya diukur dengan indikator kinerja “**Indeks Pembangunan Manusia (IPM)**” dan ditetapkan 4 (empat) sasaran strategis dengan masing-masing indikator kinerja, yaitu :

- a. Sasaran 3.1. Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat dengan indikator kinerja Umur Harapan Hidup;
- b. Sasaran 3.2. Meningkatnya Akses dan Kualitas Pendidikan dengan indikator kinerja Angka Harapan Sekolah dan Rata-Rata Lama Sekolah;
- c. Sasaran 3.3. Meningkatnya Prestasi Pemuda dan Olahraga dengan indikator kinerja Jumlah Atlet Berprestasi;

- d. Sasaran 3.4. Terbangunnya Perempuan, Anak dan Lansia yang Berkualitas dan Berdaya Saing dalam Pembangunan dengan indikator kinerja Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG).

a.3.1. Perbandingan antara Target dan Realisasi Tahun 2023

Untuk mengukur capaian kinerja tujuan 3.1. **Meningkatkan Kualitas Manusia dengan Seutuhnya** dapat dilihat dari perbandingan antara realisasi dan target tahun 2023 sebagaimana tabel sebagai berikut :

**Tabel III.2.3.1.
Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023
Untuk Tujuan Meningkatkan Kualitas Manusia Dengan Seutuhnya**

No.	Indikator Kinerja	Tahun 2023		
		Target	Realisasi	% Capaian
1.	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	70,20	72,15	103,04 %
2.	Umur Harapan Hidup	67,25	73,36	109,08 %
3.	Angka Harapan Lama Sekolah	12,65	12,44	98,33 %
4.	Jumlah Atlet Berprestasi	110 orang	477 orang	433,63 %
5.	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	72,6	67,90	93,52%
Rata-rata Capaian				167.52 %

Sumber Data : OPD Terkait

a.3.2. Perbandingan antara Realisasi Tahun 2023 dengan Tahun Sebelumnya

Untuk mengukur perbandingan capaian kinerja tujuan 3.1. **Meningkatkan Kualitas Manusia dengan Seutuhnya** dengan capaian kinerja tahun sebelumnya yaitu tahun 2022, dapat dilihat sebagaimana table sebagai berikut:

Tabel III.2.3.2.
Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Tahun 2023 Dengan Tahun Sebelumnya Untuk Tujuan Meningkatnya Kualitas Manusia Dengan Seutuhnya

No.	Indikator Kinerja	Tahun 2022			Tahun 2023		
		Target	Target	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian
1.	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	69,42	67,58	97,35 %	70,20	72,15	103,04 %
2.	Umur Harapan Hidup	66,55 Tahun	-	-	67,25 Tahun	73,36 Tahun	109,08 %
3.	Angka Harapan Sekolah	12,6 Tahun	10,81 Tahun	85,79 %	12,65 Tahun	12,44 Tahun	98,33 %
4.	Jumlah Atlet Berprestasi	108 Orang	116 Orang	107,4 %	110 orang	477 orang	433,63 %
5.	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	68,86	67,127	95%	72,6	67,90	93,52%
Rata-rata Capaian		95,385 %			167.52 %		

Sumber Data : OPD Terkait

a.3.3. Perbandingan antara Realisasi Tahun 2023 dengan Target Akhir RPJMD

Untuk melihat perbandingan capaian kinerja tujuan 3.1. **Meningkatkan Kualitas Manusia dengan Seutuhnya** dengan target akhir RPJMD, dapat dilihat dari

perbandingan antara realisasi tahun 2023 yang merupakan akhir dari RPJMD 2019 – 2023 dengan Target Akhir RPJMD Kabupaten Lahat adalah sebagaimana table sebagai berikut :

Tabel III.2.3.3.
Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Target Akhir RPJMD Untuk Tujuan Meningkatnya Kualitas Manusia Dengan Seutuhnya

No.	Indikator Kinerja	Capaian 2023	Target RPJMD
1.	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	72,15	70,02
2.	Umur Harapan Hidup	73,36 Tahun	67,25 Tahun
3.	Angka Harapan Sekolah	12,44 Tahun	12,65 Tahun
4.	Jumlah Atlet Berprestasi	477 Orang	110 orang
5.	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	67,90	72,46
Rata-rata Capaian		167,52 %	

Sumber Data : OPD Terkait

a.5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan

untuk Mewujudkan Tujuan Ketiga Pemerintah Kabupaten Lahat yaitu Meningkatnya Kualitas Manusia dengan seutuhnya diukur dengan indikator kinerja “**Indeks Pembangunan Manusia (IPM)**” dan ditetapkan 4 (empat) sasaran strategis dengan masing-masing indikator kinerja, yaitu : Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat dengan indikator kinerja Umur Harapan Hidup;

Meningkatnya Akses dan Kualitas Pendidikan dengan indikator kinerja Angka Harapan Lama Sekolah. Meningkatkan Prestasi Pemuda dan Olahraga dengan indikator kinerja Jumlah Atlet Berprestasi; Terbangunnya Perempuan, Anak dan Lansia yang Berkualitas dan Berdaya Saing dalam Pembangunan dengan indikator kinerja Indeks Pemberdayaan Gender (IDG). Pada tahun 2023 ini rata-rata capaian 5 indikator dimaksud telah mencapai target akhir RPJMD yaitu mencapai 167,52 % mengalami Peningkatan dibandingkan dengan capaian tahun 2022 yaitu 95,385 %. Meningkatkan rata-rata capaian tujuan ketiga tersebut salah satunya meningkatnya jumlah atlet berprestasi yaitu sebesar 463,33 % dari target akhir RPJMD, sedangkan target indikator kinerja yang belum tercapai 100% yaitu Angka Harapan Lama Sekolah sebesar 98,33 % dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) sebesar 93,52%.

4. Tujuan Keempat

4.1. Capaian Kinerja Tujuan “Meningkatnya Pendapatan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial”

Tujuan Keempat Pemerintah Kabupaten Lahat adalah Meningkatkan Pendapatan Masyarakat dan Kesejahteraan sosial diukur dengan indikator kinerja “**Angka Kemiskinan**”. Dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut ditetapkan 2 (dua) sasaran strategis, dengan masing-masing indikator kinerja sebagai berikut:

- a. Sasaran 4.1. Meningkatkan Kesejahteraan Sosial dengan indikator kinerja Gini Ratio;
- b. Sasaran 4.2. Meningkatkan Kesempatan Kerja dengan indikator kinerja Tingkat Pengangguran dan Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi dengan

indikator kinerja Pertumbuhan Ekonomi dengan indikator kinerja Pertumbuhan Ekonomi;

- c. Sasaran 4.2.1 Meningkatnya Ketahanan Pangan dengan indikator kinerja Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah;
- d. Sasaran 4.2.2. Meningkatnya Nilai Investasi PMA dan PMDN indikator kinerja Presentase Peningkatan PMA dan PMDN;
- e. Sasaran 4.2.3. Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah dengan indikator kinerja Nilai PAD.

a.4.1. Perbandingan antara Target dan Realisasi Tahun 2023

Capaian kinerja tujuan 4.1. Meningkatnya Pendapatan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial pada tahun 2022 ini dapat dilihat dari perbandingan antara target dan realisasi sebagaimana tabel berikut :

Tabel III.2.4.1.

**Perbandingan Antara Target Dan Realisasi Tahun 2023
Untuk Tujuan Meningkatnya Pendapatan Masyarakat
Dan Kesejahteraan Sosial**

No.	Indikator Kinerja	Tahun 2023		
		Target	Realisasi	% Capaian
1.	Angka Kemiskinan	14,8-15,2	15,0	100 %
2.	Gini Ratio	0,301	0,325	107,67%
3.	Tingkat Pengangguran	3,56	3,41	97,43 %

4.	Pertumbuhan Ekonomi	4,50	6,73	149,55%
5.	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah	30	14,6 Ton	48,66%
6.	Presentase Peningkatan PMA dan PMDN	6,5 T	8,8 T	135 %
7.	Nilai PAD	145,15 M	169,70 M	116,91 %
Rata-rata capaian				107,88% %

Sumber Data :OPD terkait

a.4.2. Perbandingan antara Realisasi Kinerja Tahun 2021 dengan Tahun Sebelumnya

Perbandingan antara capaian kinerja tujuan 4.1. Meningkatnya Pendapatan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial pada tahun 2023 ini dengan tahun sebelumnya, dapat dilihat sebagaimana tabel berikut :

Tabel III.2.4.2.
Perbandingan Antara Realisasi Tahun 2023 dengan Tahun Sebelumnya
Untuk Tujuan Meningkatnya Pendapatan Masyarakat
dan Kesejahteraan Sosial

No	Indikator Kinerja	Tahun 2022			Tahun 2023		
		Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian
1.	Angka Kemiskinan	15,2	15,92	97,36 %	14,8-15,2	15,0	100 %
2.	Gini Ratio	0,301		-	0,301	0,325	107,67%

3.	Tingkat Pengangguran	3,68	4,02	109,24%	3,56	3,41	97,43 %
4.	Pertumbuhan Ekonomi	4,41	5,36	121,5%	4,50	6,73	149,55%
5.	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah	30 Ton	31,892 Ton	109,24%	30	14,6 Ton	48,66%
6.	Persentase Peningkatan PMA dan PMDN	6 T	3,6 T	65%	6,5 T	8,8 T	135 %
7.	Nilai PAD	141,20 M	162,11 M	114,8%	145,15 M	169,70 M	116,91 %
Rata-rata capaian							107,88%

a.4.3. Perbandingan antara Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Target Akhir RPJMD

Perbandingan realisasi kinerja tujuan 4.1. Meningkatnya Pendapatan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial pada tahun 2023 dengan target akhir RPJMD dapat dilihat dari sebagaimana tabel berikut :

Tabel III.2.4.3.

**Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Tahun 2023
dengan Target Akhir RPJMD
untuk Tujuan Meningkatnya Pendapatan Masyarakat
dan Kesejahteraan Sosial**

No.	Indikator Kinerja	Realisasi 2023	Target RPJMD
1.	Angka Kemiskinan	15,0	14,8- 15,2
2.	Gini Ratio	0,325	0,301
3.	Tingkat Pengangguran	3,41	3,56
4.	Pertumbuhan Ekonomi	6,73	4,50
5.	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah	14,6 Ton	30
6.	Presentase Peningkatan PMA dan PMDN	8,8 T	6,5 T
7.	Nilai PAD	116,91 M	145,15 M

Sumber Data : OPD terkait

5. Tujuan Kelima

5.1. Capaian Kinerja Tujuan Kelima “Terwujudnya Masyarakat yang Berakhlak Mulia”

Untuk Mewujudkan Tujuan Kelima Pemerintah Kabupaten Lahat yaitu Terwujudnya Masyarakat yang Berakhlak Mulia diukur dengan indikator kinerja “**Persentase Penurunan Konflik Sosial**”. Dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut ditetapkan 2 (dua) sasaran strategis dengan masing-masing indikator kinerja sebagai berikut:

- Sasaran 5.1.1. Meningkatnya Nilai Keagamaan Masyarakat dengan indikator kinerja Jumlah penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan Masyarakat;
- Sasaran 5.1.2. Terwujudnya Budaya sebagai Identitas Spesifik Daerah dengan indikator kinerja Jumlah Lembaga Adat yang dibina.

a.5.1. Perbandingan antara Target dan Realisasi Tahun 2023

Capaian Kinerja Tujuan **Terwujudnya Masyarakat yang Berakhlak Mulia** pada tahun 2023 dapat dilihat dari perbandingan antara target dan realisasi sebagaimana tabel berikut :

Tabel III.2.5.1.

**Perbandingan Antara Target Dan Realisasi Tahun 2023
Untuk Tujuan Terwujudnya Masyarakat Yang Berakhlak Mulia**

No.	Indikator Kinerja	Tahun 2023		
		Target	Realisasi	% Capaian
1.	Persentase Penurunan Konflik Sosial	100%	100%	100%
2.	Jumlah Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan di Masyarakat	50	60	120%
3.	Jumlah Lembaga Adat yang dibina	100	39	39%

Rata-rata capaian	86,33%
-------------------	--------

Sumber Data : Setda Bagian Kesra, Dinas PMD, Badan Kesbangpol

Untuk mewujudkan Tujuan Kelima Pemerintah Kabupaten Lahat yaitu Terwujudnya Masyarakat yang Berakhlak Mulia, pada tahun 2023 ini indikator kinerjanya yaitu **“Persentase Penurunan Konflik Sosial”**. Dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut ditetapkan 2 (dua) sasaran strategis dengan masing-masing indikator kinerja sebagai berikut :

- Sasaran 5.1.1. Meningkatnya Nilai Keagamaan Masyarakat dengan indikator kinerja Jumlah Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan Masyarakat;
- Sasaran 5.1.2. Terwujudnya Budaya sebagai Identitas Spesifik Daerah dengan indikator kinerja Jumlah Lembaga Adat yang dibina. Dengan demikian ketiga indikator tersebut merupakan indikator kinerja baru yang belum pernah dihitung pada tahun-tahun sebelumnya.

a.5.2. Perbandingan antara Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun Sebelumnya

Perbandingan capaian Kinerja Tujuan **Terwujudnya Masyarakat yang Berakhlak Mulia** pada tahun 2023 dengan tahun sebelumnya yaitu tahun 2022 dapat dilihat dari sebagaimana tabel berikut :

Tabel III.2.5.2.

**Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Tahun 2023
dengan Tahun Sebelumnya
Untuk Tujuan Terwujudnya Masyarakat Yang Berakhlak Mulia**

No	Indikator Kinerja	Tahun 2022			Tahun 2023		
		Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian

1.	Persentase Penurunan Konflik Sosial	80 %	100%	125%	100%	100%	100%
2.	Jumlah Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan di Masyarakat	50	50	100%	50	60	120%
3.	Jumlah Lembaga Adat yang diBina.	100	52	52%	100	39	39%
Rata – rata Capaian				92,33%		86,33	

Sumber Data : Setda Bagian Kesra, Badan Kesbangpol, Dinas PMD

Ketiga indikator tersebut di atas yaitu : Penurunan Konflik Sosial, Jumlah Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan di Masyarakat dan Jumlah Lembaga Adat yang di bina.

a.5.3. Perbandingan antara Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Target Akhir RPJMD

Perbandingan capaian Kinerja Tujuan “**Terwujudnya Masyarakat yang Berakhlak Mulia**” pada tahun 2023 yang merupakan akhir dari RPJMD 2019 – 2023 dengan target akhir Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dapat dilihat sebagaimana tabel berikut :

Tabel III.2.5.3.

Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan RPJMD Untuk Tujuan Terwujudnya Masyarakat Yang Berakhlak Mulia

No.	Indikator Kinerja	Realisasi 2023	Target RPJMD
1.	Persentase Penurunan Konflik Sosial	100%	100%
2.	Jumlah Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan di Masyarakat	60	50

3.	Jumlah Lembaga Adat yang diBina	39	100
----	---------------------------------	----	-----

Sumber Data : Setda Bagian Kesra, Badan Kesbangpol, Dinas PMD.

a.5. Analisis penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Untuk mencapai Tujuan Ke-5 yaitu Terwujudnya Masyarakat yang Berakhlak Mulia, pada tahun 2023 ini agar dapat mengukur capaiannya ditetapkan 3 indikator kinerja yaitu :

Persentase Penurunan Konflik Sosial, Jumlah Penyelenggaraan kegiatan Keagamaan di Masyarakat dan Jumlah Lembaga Adat yang diBina.

Untuk Indikator Kinerja “Persentase Penurunan Konflik Sosial”, merupakan indikator yang baru dalam RPJMD Kabupaten Lahat Tahun 2019-2023 dengan Perangkat Daerah penanggungjawabnya adalah Badan Kesbangpol. Pengertian Konflik Sosial adalah pertentangan antar anggota masyarakat yang bersifat menyeluruh dalam kehidupan. Konflik Sosial terjadi dalam masyarakat dapat disebabkan adanya perbedaan kebudayaan, perbedaan kepentingan, adanya perubahan sosial. Berdasarkan data dari Badan Kesbangpol, di Kabupaten Lahat jumlah konflik sosial yang terjadi pada tahun 2023 adalah 10 konflik dan ke 10 konflik tersebut telah ditangani, namun yang terselesaikan adalah sebanyak 2 konflik sosial. Sehingga jika dihitung berdasarkan rumusakan yang telah ditetapkan untuk indikator kinerja “Persentase Penurunan Konflik Sosial” yaitu : $\frac{\text{Konflik yang Tertangani}}{\text{Konflik yang terjadi}} \times 100\%$

Konflik yang terjadi

Maka persentase penurunan konflik telah mencapai 100% atau mencapai target yang telah ditargetkan pada tahun 2023 ini yaitu 100%.

Untuk indikator kinerja “Jumlah Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan di Masyarakat” pada tahun 2023 ini ditargetkan sebanyak 50 kegiatan atau penyelenggaraan dan telah mencapai target 120% atau 60 kegiatan. Berdasarkan informasi dari Bagian Kesejahteraan Sosial Sekretariat Daerah, kegiatan keagamaan yang diselenggarakan baik oleh Pemerintah Kabupaten Lahat ataupun oleh masyarakat meliputi Maulid Nabi, Isra Mi'raj, Hari Santri, Nuzulul Qur'an, Shalat Iedul Fitri, Shalat Iedul Adha, Safari Ramadhan, Antar Jemput Jemaah Haji dan Kegiatan-kegiatan lain yang berkaitan dengan keagamaan. Jumlah penyelenggaraan kegiatan-kegiatan dimaksud pada tahun 2023 adalah sebanyak 60 Kegiatan, meskipun tidak semua kegiatan agama yang diselenggarakan oleh masyarakat terpantau oleh Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Lahat. Namun semua kegiatan keagamaan yang direncanakan oleh Pemerintah Kabupaten Lahat melalui Bagian Kesejahteraan Rakyat Sosial setiap tahunnya dan untuk tahun 2023 ini telah dilaksanakan dengan baik sesuai dengan rencana kegiatan.

Untuk indikator kinerja Jumlah Lembaga Adat yang di Bina yang merupakan indikator baru dengan penanggungjawab Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lahat Nomor 17 Tahun 2001, Lembaga Adat adalah organisasi masyarakat yang dibentuk merupakan wadah dalam rangka membina, memberdayakan, melestarikan dan mengembangkan adat istiadat sebagai norma, kaidah dengan keyakinan sosial yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat. Adat istiadat adalah nilai atau norma, kaidah dan keyakinan masyarakat desa dan satuan masyarakat desa lainnya serta nilai atau norma lain yang masih dihayati dan

dipelihara. Disebutkan juga bahwa Lembaga Adat dibentuk atas prakarsa masyarakat desa yang bersangkutan. Jumlah Lembaga Adat di Kabupaten Lahat saat mencapai 1.080 Lembaga Adat. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa setiap tahun melakukan kegiatan pembinaan terhadap lembaga adat. Pada tahun 2023 telah dilakukan pembinaan terhadap 39 lembaga adat, hal ini menunjukkan bahwa capaian indikator baru mencapai 39% dari yang ditargetkan pada tahun 2023 ini yaitu 100 lembaga adat yang dibina. Adapun kendala yang dihadapi dalam upaya melakukan pembinaan terhadap lembaga adat adalah dana yang belum mencukupi. Pada tahun 2023 ini dana yang dialokasikan untuk pembinaan lembaga adat hanya sejumlah Rp. 37.500.000,- sehingga pembinaan lembaga adat dilaksanakan untuk 39 Lembaga Adat di 3 (tiga) Kecamatan yaitu Kecamatan Merapi Timur, Lahat Selatan dan Gumay Talang.

B. REALISASI ANGGARAN

Pemerintah Kabupaten Lahat menetapkan 26 (dua puluh enam) indikator kinerja yang bersumber dari 5 (lima) tujuan dan 19 (sembilan belas) sasaran strategis dan telah ditetapkan pada Perjanjian Kinerja Kabupaten Lahat Tahun 2023. Anggaran untuk tahun 2023 guna membiayai 140 (seratus Empat Puluh) program pada APBD 2023 adalah sebesar Rp2.873.258.035.022,- dan mengalami penambahan anggaran pada APBD-P sebesar 3.409.409.528.912 dan dengan realisasi penyerapan anggaran dari dana tersebut adalah sebesar Rp 3.083.829.934.455,-. Atau sebesar 90,45%.

Secara lebih rinci, berdasarkan Perjanjian Kinerja Bupati Tahun 2023 program-program dan anggaran tahun 2023 adalah sebagai berikut :

NO	PROGRAM	ANGGARAN
1.	(Program) Program Aplikasi Informatika	3.289.741.812
2.	(Program) Program Hubungan Industrial	499.999.010

3.	(Program) Program Informasi Dan Komunikasi Publik	6.341.000.000
4.	(Program) Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	439.994.100
5.	(Program) Program Pembinaan Perpustakaan	2.875.000.000
6.	(Program) Program Penanggulangan Bencana	5.050.000.000
7.	(Program) Program Pencatatan Sipil	104.996.500
8.	(Program) Program Pendaftaran Penduduk	303.354.000
9.	(Program) Program Penempatan Tenaga Kerja	59.986.650
10.	(Program) Pengelolaan Arsip	450.000.000
11.	(Program) Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	104.996.500
12.	(Program) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	
	Ikml (Dinas Kesehatan)	160.500.000.000
	Indeks Kepuasan Masyarakat (Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu)	16.044.859.769
	Nilai Sakip (Sekretariat Daerah)	54.853.719.517
	Nilai Sakip (Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan)	386.015.408.134
	Nilai Sakip (Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang)	10.770.363.460
	Nilai Sakip (Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman Dan Pertanahan)	7.369.045.327
	Nilai Sakip (Dinas Satuan Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran)	7.655.661.132
	Nilai Sakip (Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik)	4.446.861.321
	Nilai Sakip (Badan Penanggulangan Bencana Daerah)	4.572.511.903
	Nilai Sakip (Dinas Sosial)	4.985.516.786
	Nilai Sakip (Dinas Transmigrasi Dan Tenaga Kerja)	5.045.431.981
	Nilai Sakip (Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak)	4.531.000.000
	Nilai Sakip (Dinas Ketahanan Pangan)	5.176.158.473
	Nilai Sakip (Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil)	7.375.152.661

Nilai Sakip (Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa)	4.081.028.427
Nilai Sakip (Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana)	4.916.800.000
Nilai Sakip (Dinas Perhubungan)	5.210.530.269
Nilai Sakip (Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian Dan Statistik)	7.497.382.329
Nilai Sakip (Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah)	5.310.011.948
Nilai Sakip (Dinas Kepemudaan Dan Olahraga)	4.467.191.360
Nilai Sakip (Dinas Perpustakaan)	5.375.731.071
Nilai Sakip (Dinas Perikanan)	5.880.332.645
Nilai Sakip (Dinas Pariwisata)	7.258.267.059
Nilai Sakip (Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura Dan Peternakan)	17.198.459.791
Nilai Sakip (Dinas Perkebunan)	2.092.342.426
Nilai Sakip (Dinas Perindustrian Dan Perdagangan)	7.021.789.107
Nilai Sakip (Sekretariat Dprd)	55.958.753.738
Nilai Sakip (Badan Pendapatan Daerah)	20.293.985.593
Nilai Sakip (Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah)	28.430.344.965
Nilai Sakip (Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sdm)	35.305.621.791
Nilai Sakip (Badan Penelitian Dan Pengembangan)	2.976.280.584
Nilai Sakip (Inspektorat)	17.868.908.458
Nilai Sakip (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah)	11.149.495.000
Nilai Sakip (Kecamatan Kikim Timur)	3.358.124.367
Nilai Sakip (Kecamatan Kikim Selatan)	2.488.283.950
Nilai Sakip (Kecamatan Kikim Tengah)	1.905.681.750
Nilai Sakip (Kecamatan Kikim Barat)	2.542.640.438
Nilai Sakip (Kecamatan Pseksu)	1.532.652.719
Nilai Sakip (Kecamatan Lahat)	14.011.127.165
Nilai Sakip (Kecamatan Pulau Pinang)	2.737.041.771
Nilai Sakip (Kecamatan Merapi Timur)	2.723.200.605

Nilai Sakip (Kecamatan Merapi Barat)	2.803.325.820
Nilai Sakip (Kecamatan Merapi Selatan)	1.803.760.183
Nilai Sakip (Kecamatan Lahat Selatan)	2.206.345.788
Nilai Sakip (Kecamatan Tanjung Tebat)	2.459.498.370
Nilai Sakip (Kecamatan Pagar Gunung)	2.459.498.370
Nilai Sakip (Kecamatan Gumay Ulu)	1.645.719.712
Nilai Sakip (Kecamatan Suka Merindu)	2.009.119.751
Nilai Sakip (Kecamatan Pajar Bulan)	2.033.808.187
Nilai Sakip (Kecamatan Jarai)	2.356.050.109
Nilai Sakip (Kecamatan Tanjung Sakti Pumu)	2.440.953.275
Nilai Sakip (Kecamatan Kota Agung)	2.649.736.292
Nilai Sakip (Kecamatan Mulak Sebingkai)	2.005.142.043
Nilai Sakip (Kecamatan Mulak Ulu)	1.853.422.145
Nilai Sakip (Kecamatan Tanjung Sakti Pumi)	3.190.976.577
Nilai Sakip (Kecamatan Gumay Talang)	2.003.385.458
Nilai Sakip (Kecamatan Muara Payang)	2.136.135.779
13. (Program) Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik)	
Indeks Mutu Pelayanan Publik (Kecamatan Kikim Selatan)	38.505.450
Indeks Mutu Pelayanan Publik (Kecamatan Kikim Timur)	42.412.000
Indeks Mutu Pelayanan Publik (Kecamatan Kikim Tengah)	120.107.150
Indeks Mutu Pelayanan Publik (Kecamatan Kikim Barat)	125.440.183
Indeks Mutu Pelayanan Publik (Kecamatan Pseksu)	123.874.320
Indeks Mutu Pelayanan Publik (Kecamatan Lahat)	856.747.815
Indeks Mutu Pelayanan Publik (Kecamatan Pulau Pinang)	115.000.000
Indeks Mutu Pelayanan Publik (Kecamatan Merapi Timur)	11.500.000
Indeks Mutu Pelayanan Publik (Kecamatan Merapi Barat)	134.401.248

Indeks Mutu Pelayanan Publik (Kecamatan Merapi Selatan)	89.081.760
Indeks Mutu Pelayanan Publik (Kecamatan Lahat Selatan)	83.101.128
Indeks Mutu Pelayanan Publik (Kecamatan Tanjung Tebat)	21.289.400
Indeks Mutu Pelayanan Publik (Kecamatan Pagar Gunung)	40.066.805
Indeks Mutu Pelayanan Publik (Kecamatan Gumay Ulu)	127.995.460
Indeks Mutu Pelayanan Publik (Kecamatan Suka Merindu)	65.548.074
Indeks Mutu Pelayanan Publik (Kecamatan Pajar Bulan)	41.170.000
Indeks Mutu Pelayanan Publik (Kecamatan Jarai)	40.266.100
Indeks Mutu Pelayanan Publik (Kecamatan Tanjung Sakti Pumu)	64.350.550
Indeks Mutu Pelayanan Publik (Kecamatan Kota Agung)	89.608.000
Indeks Mutu Pelayanan Publik (Kecamatan Mulak Sebingkai)	40.000.000
Indeks Mutu Pelayanan Publik (Kecamatan Mulak Ulu)	78.023.942
Indeks Mutu Pelayanan Publik (Kecamatan Tanjung Sakti Pumi)	144.900.000
Indeks Mutu Pelayanan Publik (Kecamatan Gumay Talang)	62.229.720
Indeks Mutu Pelayanan Publik (Kecamatan Muara Payang)	112.549.300
14. (Program) Program Penyelenggaraan Pengawasan	5.222.441.640

	(Program) Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	690.000.000
15.	(Program) Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral)	750.000.000
16.	(Program) Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	
	Ikm (Kecamatan Kikim Selatan)	26.209.650
	Ikm (Kecamatan Kikim Tengah)	11.500.000
	Ikm (Kecamatan Pulau Pinang)	25.000.000
	Ikm (Kecamatan Lahat Selatan)	17.248.850
	Ikm (Kecamatan Tanjung Tebat)	64.604.100
	Ikm (Kecamatan Pagar Gunung)	25.791.000
	Ikm (Kecamatan Suka Merindu)	15.000.000
	Ikm (Kecamatan Pajar Bulan)	23.000.000
	Ikm (Kecamatan Kota Agung)	11.500.000
	Ikm (Kecamatan Gumay Talang)	14.112.800
	Ikm (Kecamatan Muara Payang)	16.000.000
17.	(Program) Program Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan	15.000.000.000
18.	(Program) Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	435.000.000
19.	(Program) Program Perekonomian Dan Pembangunan	
	Ikm (Sekretariat Daerah)	2.569.966.650
20.	(Program) Program Perencanaan Tenaga Kerja	-
21.	(Program) Program Perizinan Penggunaan Arsip	50.000.000
22.	(Program) Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	
	Ikm (Inspektorat)	3.408.816.900
23.	(Program) Program Administrasi Pemerintahan Desa	1.412.499.885
24.	(Program) Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Dprd	54.774.869.480
25.	(Program) Program Kepegawaian Daerah	13.956.780.860

26.	(Program) Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	4.208.500.000
27.	(Program) Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	
	Persentase Gangguan Trantibum Yang Dapat Diselesaikan (KECAMATAN KIKIM SELATAN)	4.413.700
	Persentase Gangguan Trantibum Yang Dapat Diselesaikan (KECAMATAN MERAPI TIMUR)	-
	Persentase Gangguan Trantibum Yang Dapat Diselesaikan (KECAMATAN MULAK SEBINGKAI)	17.500.000
28.	(Program) Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	1.980.000.000
29.	(Program) Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	
	Persentase Usulan Masyarakat Yang Disetujui (KECAMATAN KIKIM SELATAN)	14.433.650
	Persentase Usulan Masyarakat Yang Disetujui (KECAMATAN KIKIM TIMUR)	18.440.250
	Persentase Usulan Masyarakat Yang Disetujui (KECAMATAN KIKIM TENGAH)	20.125.000
	Persentase Usulan Masyarakat Yang Disetujui (KECAMATAN KIKIM BARAT)	14.359.705
	Persentase Usulan Masyarakat Yang Disetujui (KECAMATAN PSEKSU)	12.471.750
	Persentase Usulan Masyarakat Yang Disetujui (KECAMATAN LAHAT)	28.750.000
	Persentase Usulan Masyarakat Yang Disetujui (KECAMATAN PULAU PINANG)	60.000.000
	Persentase Usulan Masyarakat Yang Disetujui (KECAMATAN MERAPI TIMUR)	63.475.000
	Persentase Usulan Masyarakat Yang Disetujui (KECAMATAN MERAPI BARAT)	23.750.950
	Persentase Usulan Masyarakat Yang Disetujui	15.529.600

	(KECAMATAN MERAPI SELATAN)	
	Persentase Usulan Masyarakat Yang Disetujui (KECAMATAN LAHAT SELATAN)	16.945.677
	Persentase Usulan Masyarakat Yang Disetujui (KECAMATAN TANJUNG TEBAT)	44.198.000
	Persentase Usulan Masyarakat Yang Disetujui (KECAMATAN PAGAR GUNUNG)	26.429.875
		17.250.000
	Persentase Usulan Masyarakat Yang Disetujui (KECAMATAN GUMAY ULU)	
	Persentase Usulan Masyarakat Yang Disetujui (KECAMATAN SUKA MERINDU)	19.926.280
	Persentase Usulan Masyarakat Yang Disetujui (KECAMATAN PAJAR BULAN)	46.000.000
	Persentase Usulan Masyarakat Yang Disetujui (KECAMATAN JARAI)	12.352.150
	Persentase Usulan Masyarakat Yang Disetujui (KECAMATAN TANJUNG SAKTI PUMU)	23.000.000
	Persentase Usulan Masyarakat Yang Disetujui (KECAMATAN KOTA AGUNG)	45.425.000
	Persentase Usulan Masyarakat Yang Disetujui (KECAMATAN MULAK SEBINGKAI)	17.500.000
	Persentase Usulan Masyarakat Yang Disetujui (KECAMATAN MULAK ULU)	18.843.129
	Persentase Usulan Masyarakat Yang Disetujui (KECAMATAN TANJUNG SAKTI PUMI)	120.750.000
	Persentase Usulan Masyarakat Yang Disetujui (KECAMATAN GUMAY TALANG)	18.132.625
	Persentase Usulan Masyarakat Yang Disetujui (KECAMATAN MUARA PAYANG)	24.091.350
30.	(Program) Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	
	Jumlah Desa (Kecamatan Kikim Selatan)	35.637.511
	Jumlah Desa (Kecamatan Kikim Timur)	139.432.210

	Jumlah Desa (Kecamatan Kikim Tengah)	-
	Jumlah Desa (KECAMATAN MERAPI TIMUR)	34.499.942
	Jumlah Desa (KECAMATAN MERAPI BARAT)	65.162.450
	Jumlah Desa (KECAMATAN MERAPI SELATAN)	30.382.713
	Jumlah Desa (KECAMATAN LAHAT SELATAN)	52.762.690
	Jumlah Desa (KECAMATAN PAGAR GUNUNG)	60.945.400
	Jumlah Desa (KECAMATAN GUMAY ULU)	17.250.000
	Jumlah Desa (KECAMATAN SUKA MERINDU)	80.841.550
	Jumlah Desa (KECAMATAN PAJAR BULAN)	103.500.000
	Jumlah Desa (KECAMATAN JARAI)	161.000.000
	Jumlah Desa (KECAMATAN TANJUNG SAKTI PUMU)	57.500.000
	Jumlah Desa (KECAMATAN KOTA AGUNG)	23.000.000
	Jumlah Desa (KECAMATAN MULAK SEBINGKAI)	91.000.000
	Jumlah Desa (KECAMATAN MULAK ULU)	20.600.000
	Jumlah Desa (KECAMATAN TANJUNG SAKTI PUMI)	103.500.000
	Jumlah Desa (KECAMATAN GUMAY TALANG)	36.590.300
	Jumlah Desa (KECAMATAN MUARA PAYANG)	36.500.000
31	(PROGRAM) PROGRAM PENATAAN DESA	807.500.000
	(PROGRAM) PROGRAM PENELITIAN DAN	2.163.476.710
	PENGEMBANGAN DAERAH	
32	(PROGRAM) PROGRAM PENGELOLAAN BARANG	4.885.640.200
	MILIK DAERAH	
33	(PROGRAM) PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN	549.048.986.933
	DAERAH	
34	(PROGRAM) PROGRAM PENGELOLAAN	9.874.236.785
	PENDAPATAN DAERAH	
35	(PROGRAM) PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER	5.025.000.000
	DAYA MANUSIA	
36	(PROGRAM) PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA	316.249.683
	DESA	
37	(PROGRAM) PROGRAM PERENCANAAN,	3.009.500.000
	PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN	

38	DAERAH (PROGRAM) PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	21.820.000.000
39	(PROGRAM) PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	27.167.834.200
40	(PROGRAM) PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	85.242.500.000
41	(PROGRAM) PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	330.000.000
42	(PROGRAM) PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	8.500.000.000
43	(PROGRAM) PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	522.445.000.000
44	(PROGRAM) PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	746.900.000
45	(PROGRAM) PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	11.275.000.000
46	(PROGRAM) PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	59.405.500.000
47	(PROGRAM) PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	3.010.000.000
48	(PROGRAM) PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	2.875.000.000
49	(PROGRAM) PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	42.686.467.754
50	(PROGRAM) PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	1.000.000.000
51	(PROGRAM) PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	1.210.000.000
52	(PROGRAM) PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	185.000.000
53	(PROGRAM) PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	125.000.000
54	(PROGRAM) PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH	250.000.000
55	(PROGRAM) PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	1.350.000.000
56	(PROGRAM) PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	6.045.000.000
57	(PROGRAM) PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3) Jumlah limbah B3 yang terkelola dan proporsi limbah B3 yang diolah sesuai peraturan perundangan (sektor industri)	300.000.000

58	(PROGRAM) PRORAM PENGENDALIAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP Kualitas air sungai sebagai sumber air baku	950.000.000
59	(PROGRAM) PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT Terlaksananya pemberian penghargaan lingkungan hidup	750.000.000
60	(PROGRAM) PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT Jumlah kecamatan peduli lingkungan hidup	350.000.000
61	(PROGRAM) PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP Terintegrasinya dokumen lingkungan hidup (RPPLH Dan KLHS) dalam rencana pembangunan kabupaten	450.000.000
62	(PROGRAM) PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENIGKATAN KELUARGA SEJATERAH (KS) Cakupan kelompok kegiatan yang yang melakukan pembinaan keluarga melalui 8 fungsi keluarga	3.563.000.000
	(PROGRAM) PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN Cakupan desa siaga aktif	944.520.000
63	(PROGRAM) PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB) Contraceptif prevalence rate (angka pembakaian kontersepsi)	8.773.000.000
64	(PROGRAM) PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORAGAN DAN UPAYAKESEHATAN MASYARAKAT Persentase cakupan puskesmas	315.494.590
65	(PROGRAM) PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK Laju pertumbuhan penduduk	2.210.000.000
66	(PROGRAM) PROGRAM PENINGKATAN KAPSITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN Cakupan SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	1.113.630.000
67	(PROGRAM) PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN Jumlah dukungan logistis yang tersedia	1.426.020.000
68	(PROGRAM) PROGRAM PENDIDIKAN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	440.000.000
	(PROGRAM) PROGRAM PENGELPLAAN PENDIDIKAN Angka kelulusan SD/MI dan SMP/Mts	231.071.500.000
69	(PROGRAM) PROGRAM PENGEMBANGAN BAHADA DAN SASTRA Jumlah Bahasa dan Sastra Lokal yang Dikembangkan	660.000.000
70	(PROGRAM) PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	

71	Sekolah Yang Mendapatkan Ijin (PROGRAM) PROGRAM PENGEMBANGAN KAPSTITAS DAYA SING KEOLARGAAN	550.000.000
72	Jumlah Atlet Berprestasi (PROGRAM) PROGRAM PENGEMBANGAN KAPSITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	10.000.847.407
73	Jumlah pemuda yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan (PROGRAM) PROGRAM PENGEMBANGAN KAPSITAS KEPRAMUKAAN	1.033.028.618
74	Jumlah pemuda yang difasilitasi dalam pendidikan kepramukaan (PROGRAM) PROGRAM PEMEHUHAN HAK ANAK (PHA)	997.499.905
75	Kabupaten layak anak (PROGRAM) PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMERDAYAAN PEREMPUAN	530.587.213
76	Indeks Pemberdayan Gender (IPG) (PROGRAM) PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	1.245.003.954
77	Indeks Pemberdayan Gender (IDG) (PROGRAM) PROGRAM PENINGATAN KUALITAS KELUARGA	160.999.942
78	Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah (PROGRAM) PROGRAM PERLINDUNGAN KUSUS ANAK	671.508.380
79	Persentase Anak Yang Memerlukan Perlindungan khusus Yang Mendapatkan Layanan Komperhensif (PROGRAM) PROGRAM PERLINDUNGAN PERMPUAN	450.600.000
80	Persentase Perempuan Korban Kekerasan Yang Mendapatkan Layanan Komerhensif (PROGRAM) PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	740.400.000
81	Persentase Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) Yang Menyediakan Sarana Prasarana Kesejahteraan Sosial (PROGRAM) PROGRAM PENANGANAN BENCANA	1.938.286.480
82	Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat (PROGRAM) PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	376.536.700
83	Lokasi Taman Makam Pahlawan yang dikelola (PROGRAM) PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	423.043.000
84	Persentase PMKS Skala yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar (PROGRAM) PROGRAM REHABILITAS SOSIAL	773.723.450
	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis	646.123.000

	yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (Indikator SPM)	
85	(PROGRAM) PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL Persentase Perusahaan yang Menerapkan Tata Kelola Kerja Yng Layak (PP/PKB, LKS, Bipartit, Stuktur Skala Upah, dan Terdaftar Peserta BPJS Ketenagakerjaan)	499.999.010
86	(PROGRAM) PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA Persentase Tenaga Kerja Yang Berserifikat Kompetensi	439.994.100
87	(PROGRAM) PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI Jumlah Satuan Pemukiman Transmigrasi yang difasilitasi pembinaanya	245.150.400
88	(PROGRAM) PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA Persentase Tenaga Kerja Yang ditempatkan (dalam dan luar negeri)	59.986.650
89	(PROGRAM) PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI Jumlah Satuan Pemukiman Transmigrasi yang difasilitasi pembinaanya	3.073.935.423
90	(PROGRAM) PROGRAM PERNCANAAN TENAGA KERJA Persentase Kegiatan yang Dilaksanakan yang Mengacu ke Rencana Tenga Kerja	
91	(PROGRAM) PROGRAM PENAGANAN KERAWANAN PANGAN Persentase Daerah Rentan Rawan Pangan	170.000.000
	(PROGRAM) PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN Persentase Bahan Pangan Yang Layak Dikomsumsi	120.000.000
92	(PROGRAM) PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN Jumlah Kawasan Lindungan Perairan	600.000.000
93	(PROGRAM) PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	8.050.000.000
94	(PROGRAM) PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGAP Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	1.250.000.000
95	(PROGRAM) PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN Persentase ketersediaan infrastuktur pergudangan dan sarana pendukung lainnya	510.000.000
96	(PROGRAM) PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENAGGULANGAN BENCANA PERTANIAN Persentase Luas Wilayah pengendalian dan	1.399.625.000

	penanggulangan bencana OPT (Permen 17 tahun 2021)	
97	(PROGRAM) PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER Persentase luas wilayah perkebunan yang bisa tertangani	365.000.000
	Persentase Pengendalian Penyakit Hewan Yang Di Tangani	11.380.362.245
98	(PROGRAM) PROGRAM PENGELOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN Persentase Komsumsi Ikan	1500.000.000
99	(PROGRAM) PROGRAM PENIKATAN DIVERSIFIKASI DAN KEETAHANAN PANGAN MASYARAKAT Persentase Cadangan Pangan Pemerintah Daerah	2.110.000.000
100	(PROGRAM) PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PERASRANA PERTANIAN Jumlah Prasaranana Perkebunan Yang Digunakan	365.000.000
	Jumlah Prasaranana Pertanian Yang Digunakan	11.380.362.245
101	(PROGRAM) PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN Jumlah Saranan Perkebunan Yang Diberikan	4.221.738.000
	Jumlah Saranan Pertanian Yang Diberikan	4.221.738.000
102	(PROGRAM) PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN Cakupan bina kelompok pertanian	4.193.684.750
	Cakupan bina kelompok tani perkebunan	250.000.000
103	(PROGRAM) PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN (SASARAN) 4.2.2 Meningkatnya nilai investasi PMA (Penanaman modal asing) dan PMDN (Penanaman modal dalam negeri)	
104	(PROGRAM) PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL Indeks Kepuasan Masyarakat	401.775.000
105	(PROGRAM) PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL Indeks Kepuasan Masyarakat	198.000.000
106	(PROGRAM) PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL Nilai investasi PMA dan PMDN	2.000.000
107	(PROGRAM) PROGRAM PENGEDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL Persentase kenaikan /penurunan nilai realisasi PMDN (Miliyar Rp)	99.825.000
108	(PROGRAM) PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL Jumlah nilai investasi bersekala nasional (PMDN/PMA)	990.000.000
109	(PROGRAM) PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM Persentase koperasi yang memiliki izin usaha	199.999.460

110	(PROGRAM) PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA Jumlah pengunjung	2.300.000.000
111	(PROGRAM) PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI Persentasi koperasi yang di berikan dukungan fasilitas kemitraan	799.998,600
112	(PROGRAM) PROGRAM PEMBERADAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM) Persentase akses pelayanan keuangan formal UMKM (Usaha mikro, kecil dan menengah)	1.219.999.860
113	(PROGRAM) PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN Persentase Koperasi Yang Telah Menyelenggarakan Pendidikan dan Pelatihan Koperasi	150.000.000
114	(PROGRAM) PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI Persentase Pemeriksaan dan Pengawasan Yang Dilakukan Untuk Koperasi Dalam 1 Tahun	549.999.575
115	(PROGRAM) PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI PERINDUSTRI NASIONAL Persentase Data Industry Kecil Menengah	150.000.000
116	(PROGRAM) PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL Jumlah Usaha Ekonomi Kreatif	953.876.180
117	(PROGRAM) PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF Persentase SDM Peserta Pembekalan Sektor Kepariwisataaan	1.738.092.260
118	(PROGRAM) PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM Rasio Pertumbuhan Wirausaha Baru Yang Bersekala Kecil	381.412.700
119	(PROGRAM) PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI Persentase Pelaku Usaha Yang Memperoleh Fasilitas Promosi Dagang	1.210.000.000
120	(PROGRAM) PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI Persentase Koperasi Aktif	344.916.650
121	(PROGRAM) PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA Persentase Destinasi Pariwisata Yang Dikembangkan	4.494.207.500
122	(PROGRAM) PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN PRESENTASE SARANA PERDAGANGAN YANG TELAH DITINGKATKAN	374.209.327
123	(PROGRAM) PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	

124	Pertumbuhan Jumlah Industri (PROGRAM) PROGRAM STABILITASI HARGA BATRANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	150.000.000
125	Persentase Stabilitas Dan Jumlah Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok (PROGRAM) PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN	150.000.000
126	IKM (PROGRAM) PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	4.822.568725
127	Benda, Situs Dan Kawasan Cagar Budaya Yang Dilestarikan (PROGRAM) PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANSASI KEMASYARAKATAN	302.500.000
128	Persentase Ormas Dan LSM Yang Terdaftar SKT Kabupaten dan Pusat (PROGRAM) PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA	820.000.000
129	Persentase Masyarakat Yang Paham Terhadap Ketahanan Bangsa dan Ekonomi (PROGRAM) PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	890.000.000
130	Jumlah Cagar Budaya Yang Dikelola Secara Terpadu (PROGRAM) PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGULANGAN PENYELAMATAN KEBAKARAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	82.500.000
131	Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran/Kota (PROGRAM) PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	2.610.000.000
132	Jumlah Museum (PROGRAM) PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	990.000.000
133	Jumlah Karya Budaya Yang Direvitalisasi Dan Investarisasi (PROGRAM) PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	1.760.000.000
134	Penyelenggaraan Fasilitas Seni Dan Budaya (PROGRAM) PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER DAN KEBANGSAAN	990.000.000
135	Persentase Masyarakat Yang Paham Terhadap Ideologi Pancasila Dan Wasbang (PROGRAM) PROGRAM PENINGKATAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	1.090.000,000
136	Persentase Gangguan Trantibun Yang Dapat Diselesaikan (PROGRAM) PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK	3.495.000.000

	SOSIAL	
	Persentase Pencegahan Konflik Sosial di Masyarakat	4.320.000.000
137	(PROGRAM) PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	
	Persentase Partisipasi Masyarakat Dalam Politik	2.230.000.000
		2.873.258.035.022

BAB IV

P E N U T U P

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja yang dilakukan terhadap 26 (dua puluh enam) indikator kinerja yang bersumber dari 5 (lima) tujuan dan 17 (tujuh belas) indikator kinerja utama, maka dapat disimpulkan kinerja Pemerintah Kabupaten Lahat Tahun 2023 sebagai berikut :

1. Untuk Tujuan **Meningkatnya Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik(*good government*) dan Bersih(*clean government*)** indikator kinerjanya **Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) capaian** kinerjanya baru mencapai 87,79 %. Namun rata-rata capaian kinerjanya termasuk dalam kategori berkinerja **tinggi** yaitu dengan capaian 91,59 %. Pencapaiannya juga diukur dari 2 (dua) sasaran strategis yaitu :
 - **Meningkatnya Pelayanan Prima bagi Masyarakat** dengan indikator kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) capaian kinerjanya 99,10 %;
 - **Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Capaian Kinerja Pembangunan yang Transparan dan Akuntabel** dengan indikator kinerja Nilai SAKIP capaian kinerjanya 87,89 %. Demikian rata-rata capaian kinerja tujuan yang pertama **Meningkatnya Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (*good government*) dan Bersih (*clean government*)** indikator kinerjanya **Indeks Reformasi Birokrasi (IRB)** adalah 91,59 % atau berkinerja tinggi.
2. Untuk Tujuan **Mengurangi Ketimpangan Antar Wilayah** dengan indikator kinerjanya adalah **Indeks Aksesibilitas**, untuk Indeks Akseibilitas capaian kinerja adalah 75,75 % atau baru mencapai angka 0,25 dari 0,33 yang ditargetkan pada tahun 2023. Namun untuk rata-rata capaian kinerja termasuk dalam kategori berkinerja sangat tinggi atau

dengan capaian kinerja 97,82 %, diuraikan dalam 5 (lima) sasaran strategis dengan masing-masing indikator sebagai berikut :

- Sasaran **Meningkatnya Kapasitas Infrastruktur Wilayah** dengan indikator kinerja Persentase Jalan Kabupaten Dalam Kondisi Mantap, capaian kinerjanya telah melampaui **target** yaitu baru 110,63%;
 - Sasaran Terbangunnya Jaringan Infrastruktur Perhubungan yang Terpadu dan Merata ke seluruh wilayah, capaian kinerjanya belum mencapai target yaitu baru 71,11%;
 - Sasaran **Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas jaringan Irigasi, Rawa serta Jaringan Irigasi Lainnya** dengan indikator kinerja Rasio Jaringan Irigasi capaian kinerjanya telah melampaui **target** yaitu 113,46 %;
 - Sasaran **Tersedianya Sarana dan Prasarana Dasar Pemukiman** dengan indikator kinerja Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni capaian kinerjanya telah mencapai target pada tahun 2023 ini adalah 100,54 %.
 - Sasaran **Terwujudnya Kesesuaian Pemanfaatan Ruang** dengan indikator kinerja Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang, capaian kinerjanya **sudah melebihi target** yaitu 103,42 % dari target yang ditetapkan;
 - Sasaran **Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup** dengan indikator kinerja Indeks Kualitas Lingkungan Hidup, capaian kinerjanya untuk tahun 2023 ini juga telah melebihi target sebesar 109,83 %..
3. Untuk Tujuan **Meningkatnya Kualitas Manusia dengan Seutuhnya** dengan indikator kinerja Indeks Pembangunan Manusia (IPM) capaian kinerjanya telah melampaui target yaitu 103,04 %, dengan rata-rata capaian kinerja 167,52 % dan termasuk dalam

kategori berkinerja **sangat tinggi** dari 4 (empat) sasaran strategis dengan masing-masing indikator sebagai berikut:

- Sasaran **Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat** dengan indikator kinerja Umur Harapan Hidup capaiannya sudah melampaui target yaitu Mencapai 109,08%.
- Sasaran **Meningkatnya Akses dan Kualitas Pendidikan** dengan indikator kinerja, yaitu Angka Harapan Lama Sekolah capaiannya hampir mencapai target yaitu 98,33%;
- Sasaran **Meningkatnya Prestasi Pemuda dan Olahraga** dengan indikator kinerja Jumlah atlet berprestasi, capaiannya sudah melampaui target yaitu mencapai 433,63%;
- Sasaran **Terbangunnya Perempuan, Anak dan Lansia yang Berkualitas dan Berdayasaing dalam Pembangunan** dengan indikator kinerja yaitu IDG, rata-rata capaiannya hampir mencapai target yaitu 93,52%;

4. Untuk Tujuan **Meningkatnya Pendapatan Masyarakat dan Kesejahteraan** dengan indikator kinerja Angka Kemiskinan, capaian kinerjanya untuk tahun 2023 ini 107,88 %, rata-rata capaian kinerjanya telah melampaui target atau termasuk dalam kategori berkinerja **sangat tinggi** dengan capaian sebesar 107,88 % dan memiliki 6 sasaran strategis dengan masing-masing indikator kinerja sebagai berikut :

- Sasaran **Meningkatnya Kesejahteraan Sosial** dengan indikator kinerja Gini Ratio, capaian Kinerja untuk tahun 2023 ini sudah Melampaui target yaitu 107,6 %.
- Sasaran **Meningkatnya Kesempatan Kerja** dengan indikator kinerja Tingkat Partisipasi Tingkat Pengangguran Terbuka, untuk tahun 2023 ini capaian kinerja adalah 97,43 %.

- Sasaran **Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi** dengan indikator kinerja Pertumbuhan Ekonomi, Indikator Kinerja Pertumbuhan Ekonomi capaian Kinerja untuk Tahun 2023 sudah melampaui target yaitu 149,55 %.
 - Sasaran **Meningkatnya Ketahanan Pangan** dengan indikator kinerja jumlah Cadangan Pangan Pemerintah, untuk Tahun 2023 capaian kinerjanya belum mencapai target yaitu 48,66%
 - Sasaran **Meningkatnya Nilai Investasi PMA dan PMDN** dengan indikator kinerja Persentase Peningkatan PMA dan PMDN, untuk tahun 2023 ini capaian kinerja adalah 135 %;
 - Sasaran Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dengan indikator kinerja Jumlah Nilai PAD, untuk tahun 2023 ini capaian kinerja adalah 116,916 %.
5. Untuk mewujudkan Tujuan Kelima Pemerintah Kabupaten Lahat yaitu Terwujudnya Masyarakat yang Berakhlak Mulia dengan indikator kinerja “Persentase Penurunan Konflik Sosial” persentase capaian kinerjanya melebihi target yaitu mencapai 125 %. Dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut ditetapkan 2 (dua) sasaran strategis dengan masing-masing indikator kinerja sebagai berikut :
- Sasaran 5.1.1. Meningkatkan Nilai Keagamaan Masyarakat dengan indikator kinerja Jumlah Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan Masyarakat, capaian kinerjanya 120 %;
 - Sasaran 5.1.2. Terwujudnya Budaya sebagai Identitas Spesifik Daerah dengan indikator kinerja Jumlah Lembaga Adat yang dibina, sasaran kinerjanya baru mencapai 39 %.

B. REKOMENDASI

Keberhasilan yang dicapai Pemerintah Kabupaten Lahat tidak terlepas dari kerja keras Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lahat serta apresiasi dan dukungan dari Bupati Lahat. Namun demikian harus diakui bahwa dalam rangka perbaikan kinerja ke depan, ada beberapa tantangan yang perlu mendapat perhatian yang lebih serius, antara lain :

1. Terhadap sasaran yang capaian kinerjanya belum mencapai target yaitu **Indeks Reformasi Birokrasi, Indeks Kepuasan Masyarakat, Nilai SAKIP, Indeks Aksesibilitas, Rasio Konektivitas, Angka Harapan Sekolah, Indeks Pemberdayaan Gender, Tingkat Pengangguran, Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah dan Jumlah Adat yang dibina**, perlu dilakukan evaluasi yang lebih mendalam untuk merumuskan program dan kegiatan yang mampu mengatasi masalah tersebut ditahun mendatang;
2. Agar pelaksanaan program dan kegiatan dapat dilaksanakan secara optimal sesuai dengan target indikator kinerja yang telah ditetapkan, maka optimalisasi mekanisme manajemen internal Pemerintah Daerah Kabupaten Lahat harus ditingkatkan untuk secara pro aktif memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan berbagai kegiatan yang dilaksanakan;
3. Dalam rangka perbaikan sistem monitoring, evaluasi, pengendalian capaian kinerja dan pelaporan kinerja, maka upaya pengembangan terhadap E-Sakip perlu dilakukan terutama berkaitan dengan penambahan fitur dan aplikasi baru yang mampu meningkatkan kualitas akuntabilitas kinerja Pemerintah Kabupaten Lahat di masa yang akan datang;
4. Dengan keluarnya Surat Edaran Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 05 Tahun 2021 tanggal 4 Maret 2021, bahwa untuk

menindaklanjuti arahan Presiden dan Wakil Presiden tentang penyederhanaan pelaporan, serta berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta memperhatikan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, maka terhitung sejak terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020, pemerintah daerah kabupaten/kota/provinsi tidak menyusun laporan kinerja tersendiri karena laporan kinerja pemerintah kabupaten/kota/provinsi disusun menjadi satu dengan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD).